

**STRATEGI PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
(IPAL) SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM
MENUNJANG KAWASAN DESA WISATA.
(Studi Pada Desa Pandanrejo Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Oleh :

SETIYA MARTHA DWIYUDA

NIM : 0910313130



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2016

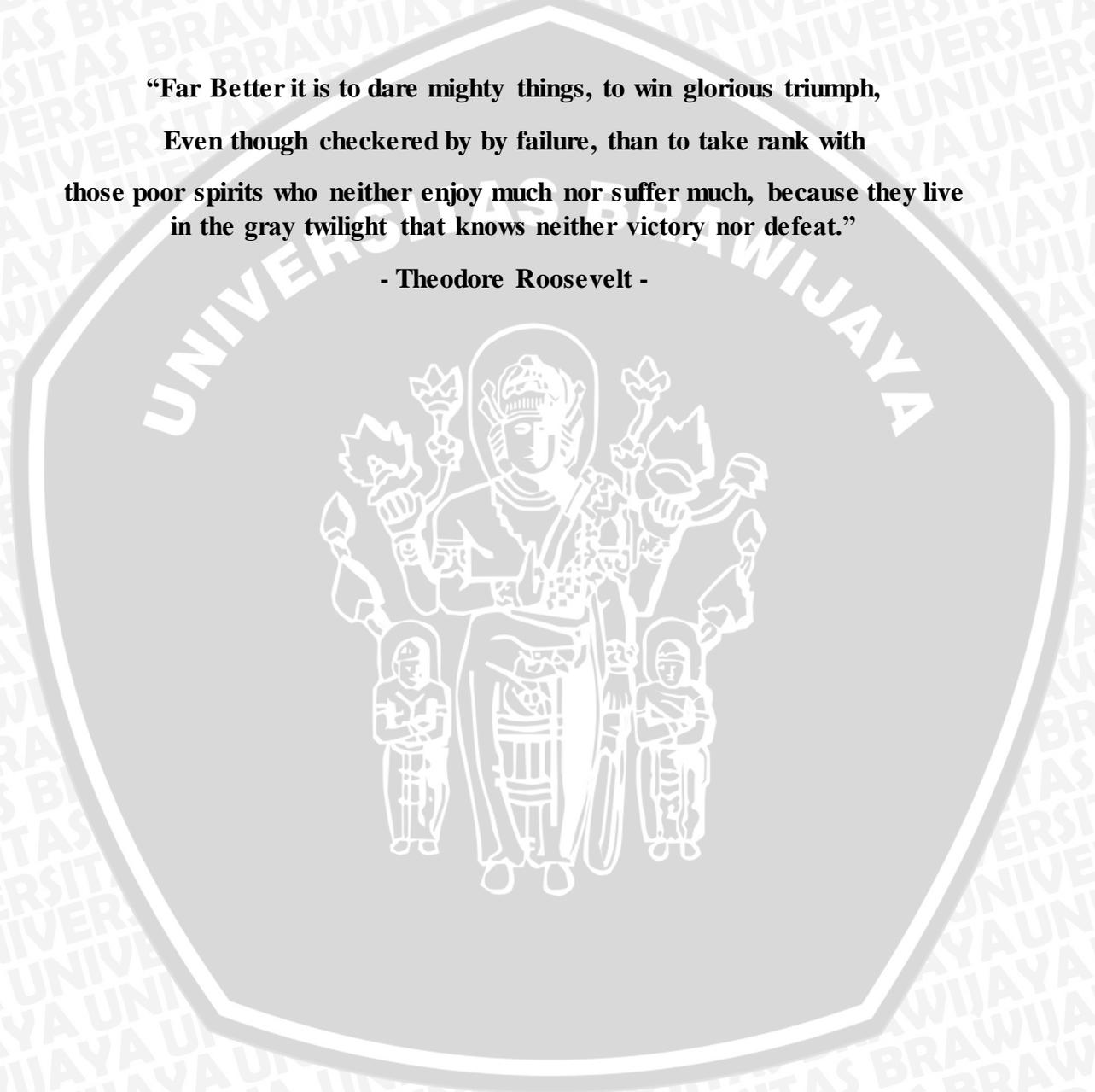
MOTTO

NO PRESSURE , NO DIAMOND

- Thomas Carlyle -

**“Far Better it is to dare mighty things, to win glorious triumph,
Even though checkered by by failure, than to take rank with
those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live
in the gray twilight that knows neither victory nor defeat.”**

- Theodore Roosevelt -



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)
Dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata
(Studi Pada Desa Pandanrejo)

Disusun Oleh : Setiya Martha Dwiyuda

NIM : 0910313130

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 15 Juli 2016

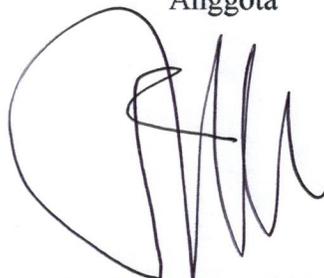
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Univesitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Agustus 2016
Jam : 09.00 - 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Setiya Martha Dwiyuda
Judul : Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pandanrejo).

Dan dinyatakan lulus.

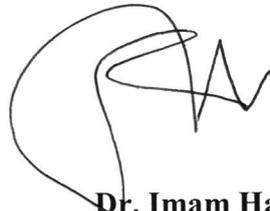
Majelis Penguji

Ketua



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si, Ms
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP, M.AP
NIP. 850421 03 11 0127

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia karya ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 pasal 70)

Malang, 15 Juli 2016

Mahasiswa



Setiya Martha Dwiyuda

NIM. 0910313130

RINGKASAN

Setiya Martha Dwiyuda, **Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pandanrejo)**, Ketua: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si Anggota: Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya kebutuhan sanitasi dasar manusia dalam menunjang kawasan Desa Wisata. Perkembangan kepariwisataan Indonesia yang mampu menjadi penggerak perekonomian nasional yang potensial, dengan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun mulai 2001 hingga sekarang. Dengan melihat perkembangan saat ini Kota Batu disebut dengan Kota Pariwisata dengan kepariwisataan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) utama. Salah satu usaha pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pariwisata adalah dengan membentuk Desa Wisata pada setiap Desa yang memiliki potensi pariwisata. Namun terdapat beberapa masalah dan hambatan yaitu tentang sarana prasarana sanitasi dasar, sehingga pemerintah menerapkan program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dengan dana bantuan dari ADB (*Asian Development Bank*) berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pemerintah berharap agar program ini dapat dilaksanakan secara optimal untuk menunjang kawasan Desa Wisata.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam menunjang Desa Wisata dengan menggunakan teori manajemen strategik Fred R. David. Dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam menunjang kawasan Desa Wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data – data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara, pengamatan (Observasi) dan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam menunjang kawasan Desa Wisata di Desa Pandanrejo adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.. Hasil penelitian ini menguatkan teori manajemen strategik Fred R. David yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Namun ditemukan beberapa masalah teknis dalam mengoptimalkan strategi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam menunjang kawasan Desa Wisata di Desa Pandanrejo, antara lain, SDM Masyarakat Desa yang kurang; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi; kurangnya sinergi pemerintah dan masyarakat; dan kurangnya sinergi antar pemerintah.

Kata Kunci : Manajemen Strategik, Instalasi Pengolahan Air Limbah, SPBM

SUMMARY

Setiya Martha Dwiyuda, **Development Strategy of Wastewater Treatment Plant (WWTP) Community-Based Urban Sanitation (SPBM) In Supporting Countryside Tourism (Studies in Pandanrejo Village)**, Head Guide Lecturer: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si 2nd Guide Lecturer: Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

This research was conducted on the basis of the importance of human basic sanitary needs in supporting countryside tourism. The development of tourism in Indonesia that can be a potential activator of the national economy, to show an increase over the years from 2001 to now. With current development, Batu City called the “Tourism City” with tourism as the main regional income. One of the government's efforts to increase tourism is formed tourism village in each village that has the potential of tourism. But there are some problems and obstacles that is about basic sanitation infrastructure, so that the government implement a program of Community Based Urban Sanitation (SPBM) with a grant from the ADB (Asian Development Bank) in the form of construction of the Waste Water Treatment Plant (WWTP). The government hopes that this program can be implemented optimally to support the countryside tourism.

The purpose of this research is to describe and analyze the development strategy of Wastewater Treatment Plant (WWTP) Community-Based Urban Sanitation (SPBM) in support of the countryside tourism by using the theory of Fred R. David “strategic management”. And to describe and analyze inhibiting development factors of Waste Water Treatment Plant (WWTP) Community-Based Urban Sanitation (SPBM) in supporting countryside tourism. This study uses a qualitative method. The data obtained is the result of interviews, observation (Observation) and technical documentation. While data analysis used in this research is a model of interactive data analysis by Miles and Huberman.

The results of this research indicate that the development strategy of Wastewater Treatment Plant (WWTP) Community-Based Urban Sanitation (SPBM) in supporting the countryside tourism in Pandanrejo village is to empower the community by strengthening the capacity of local community in planning, implementation and management of community-based sanitation. The results of this study reinforce the strategic management theory Fred R. David, as planning, implementation and evaluation.

But found some technical problems in the development of strategies to optimize the Wastewater Treatment Plant (WWTP) Community-Based Urban Sanitation (SPBM) in supporting countryside tourism in Pandanrejo village, among others, human resources Village Community are less; lack of public awareness of sanitation; lack of synergy of government and society; and the lack of synergy between governments.

Key Word : Strategic Management, Waste Water Treatment Plant, SPBM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pandanrejo).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan.
5. Bapak Dr. Riyanto, M.Hum selaku Anggota Majelis Penguji pertama atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan

6. Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA selaku Anggota Majelis Kedua Atas Arahan dan bimbingan yang telah diberikan
7. Kepada kedua orang tua dan kakak saya atas doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ir. Moh. Dakkir, MM selaku Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu.
9. Ibu Paina, SE selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
10. Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
11. Bapak Abdul Manan, S.Sos selaku Kepala Desa Pandanrejo
12. Putro selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Manajemen BKM Bhakti Sejahtera Desa Pandanrejo
13. Kepada seluruh jajaran staf BKM Bhakti Sejahtera Desa Pandanrejo

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Malang, juni 2016 Penulis



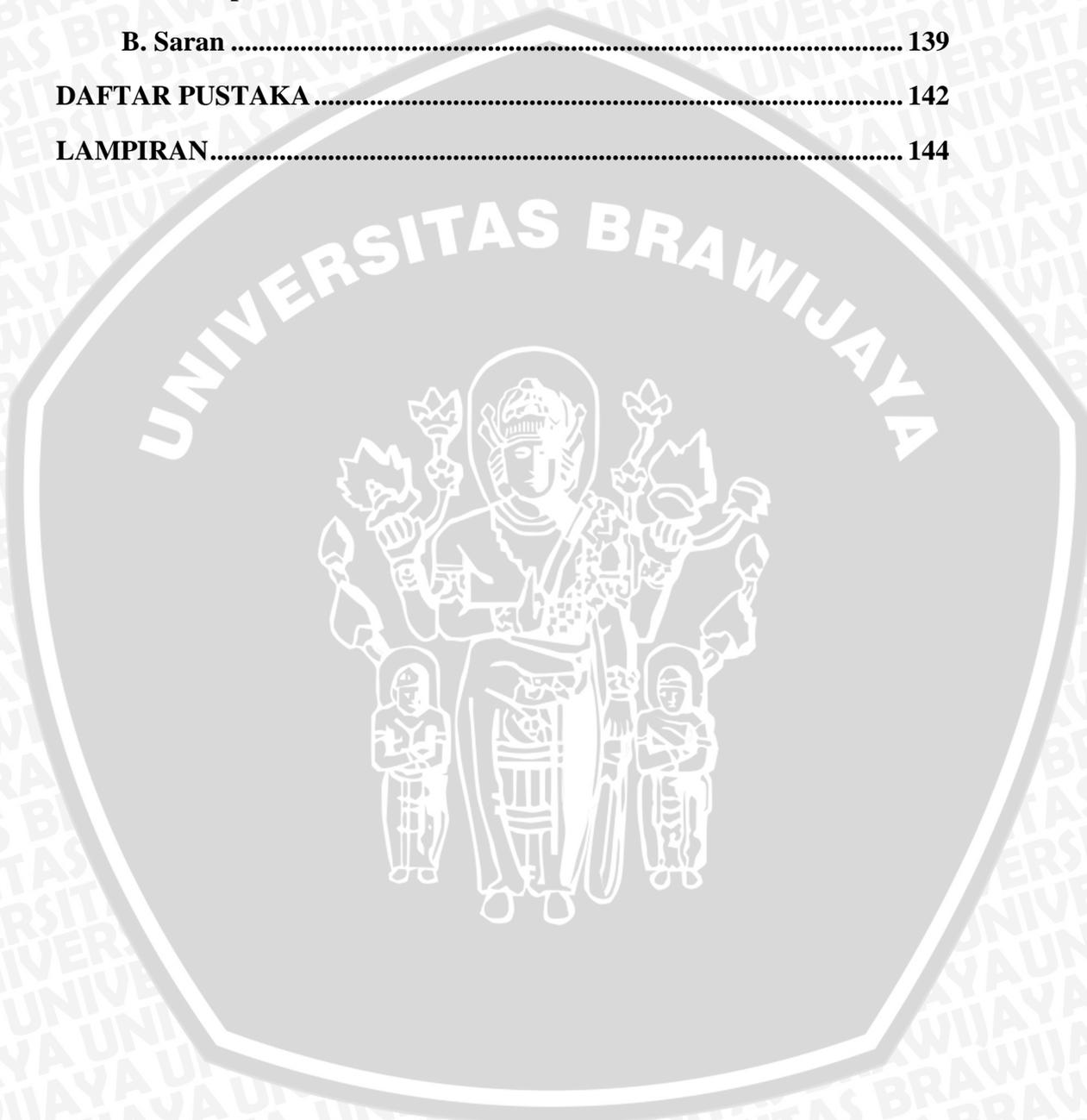
DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARYvi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Manajemen Strategik	12
B. Pembangunan Infrastruktur.....	22
C. Sanitasi Perkotaan	26
D. Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Based Development)	26
E. Desa Wisata.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	40
D. Sumber dan Jenis Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41



F. Instrumen Penelitian	42
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	46
1. Kota Batu	46
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu	52
3. Profil Desa Pandanrejo	64
4. Program SPBM	67
5. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).....	76
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	79
1. Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.....	79
a. Perencanaan Pembangunan IPAL SPBM.....	79
b. Implementasi Pembangunan IPAL SPBM.....	93
c. Evaluasi Pembangunan IPAL SPBM	105
2. Faktor penghambat Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata	108
C. Analisis Data.....	113
1. Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.....	113
a. Perencanaan Pembangunan IPAL SPBM.....	118
b. Implementasi Pembangunan IPAL SPBM.....	123
c. Evaluasi Pembangunan IPAL SPBM	121
2. Faktor penghambat Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata	133

BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	144



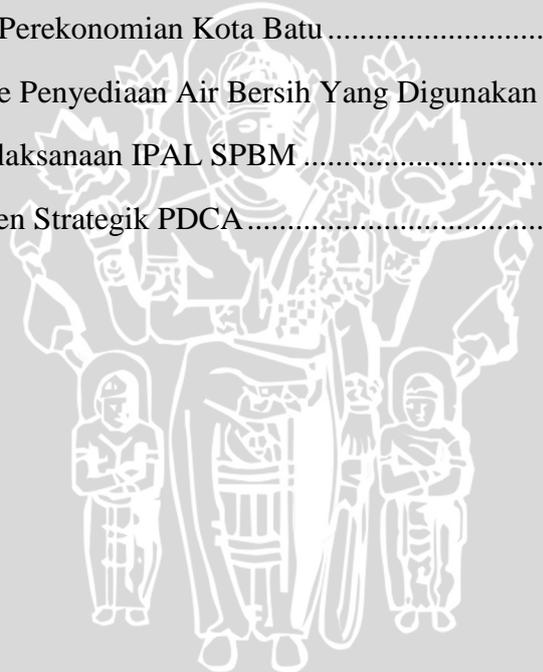
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Jumlah Penduduk dan Luasan RW di Desa Pandanrejo.....	65
Tabel 4.2. Data Jenis Penyakit Berbasis Lingkungan	81
Tabel 4.3. Data kesehatan / data penderita penyakit yang berkaitan dengan kondisi sanitasi	82
Tabel 4.4. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Pandanrejo.....	84
Tabel 4.5. Data Pemasangan Meter s/d Desember 2008.....	91
Tabel 4.6. Alokasi Program SPBM.....	97
Tabel 4.7. Hasil Pemetaan Sanitasi Menurut Pokjasa dan SSK Kota Batu di Desa Pandanrejo.....	98
Tabel 4.8. Perbedaan Tahapan Pelaksanaan Program di Tingkat Masyarakat.....	101
Tabel 4.9. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi.....	125
Tabel 4.10. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Desa Pandanrejo Tahun 2013	127
Tabel 4.11. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Desa Pandanrejo Tahun 2014	129
Tabel 4.12. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Desa Pandanrejo Tahun 2015	131



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sebuah Model Dasar Dari Proses Manajemen Strategik	14
Gambar 2.2. Manajemen Strategik PDCA	15
Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	44
Gambar 4.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Batu	64
Gambar 4.2. Peta Pandanrejo	65
Gambar 4.3. Struktur Organisasi BKM	79
Gambar 4.4. Kegiatan Perekonomian Kota Batu	84
Gambar 4.5. Prosentase Penyediaan Air Bersih Yang Digunakan	92
Gambar 4.6. Bagan Pelaksanaan IPAL SPBM	104
Gambar 4.7. Manajemen Strategik PDCA	116



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 5.1. Rembug BKM “BHAkti SEJAHTERA” Desa Pandanrejo 144

Gambar 5.2. Rembug KSM Desa Pandanrejo..... 144

Gambar 5.3. Pengerjaan Pipa IPAL SPBM Desa Pandanrejo 145

Gambar 5.4. Pengecekan berkala oleh pemanfaat 145

Gambar 5.5. Infrastruktur Instalasi Penngolahan Air Limbah
Desa Pandanrejo..... 146

Gambar 5.6. Pemanfaatan hasil olahan IPAL terhadap tanaman
di Desa Pandanrejo..... 146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas kurang lebih 1.990.250 km². Memiliki sekitar 17.504 pulau dan lebih dari 400 gunung berapi yang diperkirakan 150 diantaranya dinyatakan masih aktif. Memiliki letak astronomis 06° 04' 30"LU (Pulau Rondo) - 11° 00' 36"LS (Pulau Dana) dan dari 94° 58' 21"BT (Pulau Benggala) - 141° 01' 10"BT (Sungai Torasi). Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia beriklim tropis yang mengakibatkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati serta sumber daya alamnya. Selain itu Indonesia juga terletak antara dua samudra dan dua benua yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik; Benua Asia dan Benua Australia yang menjadikan Indonesia merupakan negara strategis dalam wilayah perairan perdagangan Internasional.

Keadaan geografis Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil bumi dan tambang. Kekayaan Indonesia tersebut dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan masyarakat Indonesia, menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkannya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan

dan keanekaragaman kebudayaan serta kepulauan Indonesia dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.

Kepariwisataan Indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pada tahun 2008 kepariwisataan Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 153,25 trilyun atau 3,09% dari total PDB Indonesia (BPS, 2010). Pada tahun 2009, kontribusinya meningkat menjadi 3,25%. Pertumbuhan PDB pariwisata pun sejak tahun 2001 selalu menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan PDB nasional. Walaupun masih menunjukkan angka sementara, pada tahun 2009 pertumbuhan PDB pariwisata mencapai 8,18%, sedangkan PDB nasional hanya 4,37%. Pada tahun yang sama, devisa dari pariwisata meurupakan kontributor terbesar ketiga devisa negara, setelah minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Peringkat ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejak tahun 2006 yang hanya menempati peringkat ke-6 dari 11 komoditi sumber devisa negara. (KEMENPAR : 2011)

Kepariwisataan memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luas antara lain, meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal; memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif; menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal bagi suatu daerah atau negara; meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut; mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru; menghindari konsentrasi penduduk dan peyebaran aktivitas ekonomi; dan

penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah; serta manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber *revenue* bagi otoritas lokal (WTO, 1980 : 9-12). Namun demikian diperlukan strategi pembangunan kepariwisataan baik dari segi sistem, sumber daya dan juga infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Siagian (1994:20) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994:57) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Namun demikian pembangunan infrastruktur masih belum merata pada setiap daerah. Pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan sehingga akses dan sarana prasarana di kawasan pedesaan masih jauh dari kata terpenuhi. Pedesaan juga merupakan sumber dari PAD yang dapat membangun perekonomian nasional. Pedesaan merupakan penghasil kebutuhan pokok sehari – hari seperti, beras, sayuran, buah – buahan, kerajinan, dan lain sebagainya. Selain itu pariwisata alam yang juga merupakan sumber PAD daerah pariwisata merupakan bagian dari

pedesaan yang disebut dengan desa wisata seperti agrowisata, ekowisata, dan wisata alam lainnya.

“The availability of wastewater or sanitation infrastructure is one of the basic human needs with the main purpose of separating human waste from the living environment to prevent diseases. World Health Organization (WHO) found that bad sanitation condition causes 85-90% diarrhea in developing country and causes 1,6 million children death under the age of 5...”
(Setiawati, 2013)

Ketersediaan infrastruktur pengolahan air limbah dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dengan tujuan utama memisahkan kotoran manusia dari lingkungan hidup untuk mencegah penyakit. *World Health Organization* (WHO) menemukan bahwa kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan 85-90% diare pada negara berkembang dan menyebabkan 1,6 juta kematian pada balita. Indonesia dimana termasuk dalam negara berkembang dengan bermacam masalah yang dihadapi antara lain adalah tentang infrastruktur pengolahan air limbah dan sanitasi yang baik. Kurangnya infrastruktur pengolahan air limbah dan sanitasi yang baik dapat menimbulkan dampak yang buruk seperti yg telah di ulas pada kutipan jurnal di atas. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran serta edukasi terutama pada masyarakat pedesaan yang kebanyakan masi belum begitu menyadari akan kualitas hidup yang sehat.

“Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.”
(Inskeep, 1991: 166)

Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Desa Wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah Desa Wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan. Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria yaitu :

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe one day trip atau tipe tinggal inap.

Desa Pandanrejo merupakan salah satu Desa Wisata yang berada di Kota Batu. Desa Pandanrejo merupakan salah satu Desa Wisata yang cukup berkembang dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga pemerintah dan masyarakat Desa berkewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakatnya terutama di Desa Wisata Pandanrejo. Dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Namun terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan pengembangan Desa Wisata di Desa Pandanrejo antara lain adalah sarana prasarana penunjang suatu Desa Wisata. Salah satu sarana prasarana penunjang kawasan Desa Wisata itu adalah kebutuhan sanitasi dasar manusia. Kurang adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dasar untuk menunjang suatu kawasan Desa Wisata menjadi salah satu masalah di Desa Pandanrejo.

“In developing country, the simplicity and low cost of construction of lavatory (simple hole) without operation and maintenance, contributes in spreading the disease through the ground water contamination...”

(Setiawati, 2013)

Di negara berkembang, pembangunan sanitasi pengolahan limbah komunal / WC yang alakadarnya dan minim biaya tanpa pengoperasian dan perawatan yang baik, berkontribusi menyebarkan berbagai macam penyakit melalui kontaminasi air

tanah. Pemerintah memiliki program yang bertujuan memfasilitasi desa wisata terutama infrastruktur sanitasi pengolahan limbah komunal yang merupakan masalah krusial yang ada di pedesaan. Program itu adalah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM-Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Program SPBM ini dilaksanakan secara bertahap di 1350 kelurahan yang berada di 34 Kabupaten/Kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut telah menerima dana BLM sebanyak 3 kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya program SPBM yang dilaksanakan dalam rangka mendukung salah satu upaya pencapaian target *MDG's (Millenium Development Goal's)* pada 2015, yaitu menurunkan sebesar 50% dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar serta sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan

pengelolaan air limbah. Desa wisata Pandanrejo menjadi salah satu desa pelaksana program SPBM dari pemerintah. Pemerintah berharap agar Desa wisata Pandanrejo dapat semakin berkembang dengan di bangunnya infrastruktur SPBM berupa IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Selain itu pemerintah menginginkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta *stakeholder* agar dapat saling bekerjasama secara komprehensif. Namun keterlibatan dan komitmen pemangku-kepentingan (*stakeholder*) termasuk pemerintah, dunia usaha, dan warga masih jauh dari kemampuan untuk bersama-sama berembung dan bertindak sesuai kesepakatan peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah guna mengembangkan desa wisata.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi pembangunan infrastruktur IPAL SPBM dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata yang ada di desa Pandanrejo dikarenakan minimnya SDM dan infrastruktur masyarakat pedesaan, sehingga penulis mengambil judul “**Strategi Pembangunan Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pandanrejo)**”.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian yang dijelaskan diatas serta berkaitan dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka permasalahan dan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Strategi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata di Desa Pandanrejo?
2. Apa sajakah faktor penghambat pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam menunjang kawasan desa wisata di Desa Pandanrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis agar dapat menambah referensi wacana dan pengetahuan. Selain itu hasil penelitian ini,

diharapkan dapat memberi kontribusi pada kumpulan penulisan ilmiah di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau solusi bagi pemerintah khususnya strategi pembangunan infrastruktur IPAL SPBM dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata di desa Pandanrejo serta diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan. Dimana pada latar belakang menjelaskan secara singkat permasalahan tentang strategi pembangunan IPAL SPBM dalam menunjang kawasan Desa Wisata. Merumuskan masalah yang akan di teliti, sehingga nantinya menghasilkan tujuan dan kontribusi penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai beberapa konsep atau teori tentang Manajemen Strategik, Pembangunan Infrastruktur, Sanitasi, Pembangunan Berbasis Masyarakat dan Desa Wisata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisikan tentang metode yang dipakai dalam penelitian, diantaranya: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan

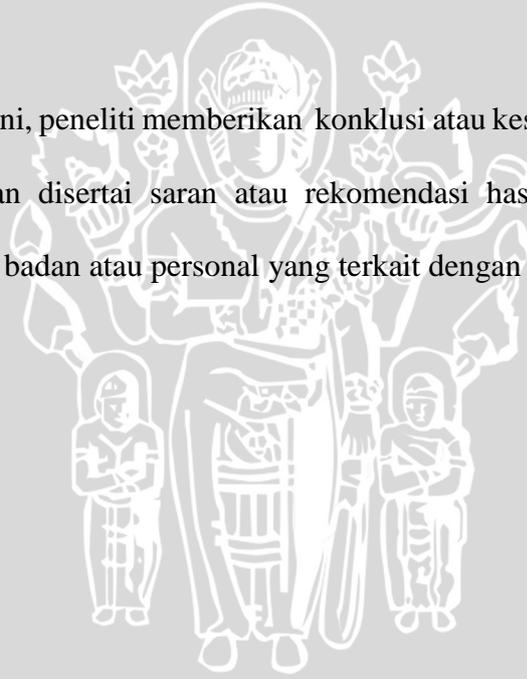
sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai penyajian data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data dan interpretasi data yang berkaitan dengan Strategi pembangunan infrastruktur IPAL SPBM dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata di desa Pandanrejo

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti memberikan konklusi atau kesimpulan dari hasil data penelitian, dengan disertai saran atau rekomendasi hasil penelitian guna sebagai masukan bagi badan atau personal yang terkait dengan obyek penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Manajemen Strategik

Para pelopor konsep strategi memberikan definisi tentang strategi. Adapun definisi menurut Chandler, (1962: 13) dalam Kuncoro, 2005 penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh

(Agus Suryono : 2001, 84) Pembangunan sebagai strategi berorientasi pada: (1) pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan sosial, (2) penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan, (3) pertanian sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit, informasi, *input*, dan infrastruktur pasar bagi masyarakat miskin, (4) teknologi

padat karya dan tepat guna, dan (5) Penekanan pada aspek sosial, politik dan ekonomi dari pembangunan.

Dari definisi strategi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya strategi dapat dipahami sebagai seseorang yang memiliki jabatan pada tingkat top manajemen dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab atas hidup dan matinya organisasi tersebut. Strategi yang dibuat suatu organisasi atau perusahaan haruslah selaras dengan visi dan misi yang ada pada organisasi atau perusahaan yang secara spesifik terlihat didalam tujuan dan sasaran yang dibuat perusahaan. Yang tidak boleh dilupakan adalah strategi yang dibuat perusahaan sudah merupakan hasil dari analisis strategi itu sendiri dan mengharapkan untuk dapat mengimplementasikan semua strategi tersebut.

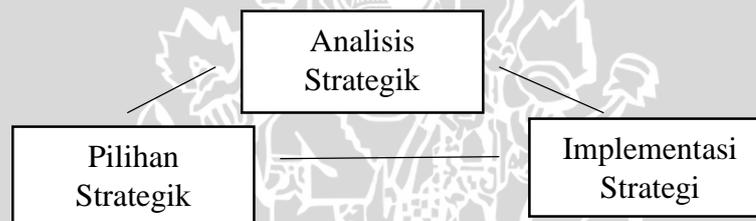
Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena berlangsung secara terus - menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu berubah - ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi.

Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam

elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana penyusun strategi (strategis) yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi yang bersangkutan. Terdapat pula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. Akhirnya terdapat pula implementasi strategi yang berhubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan.

Ketiga macam pendekatan dirangkumkan dalam gambar berikut:

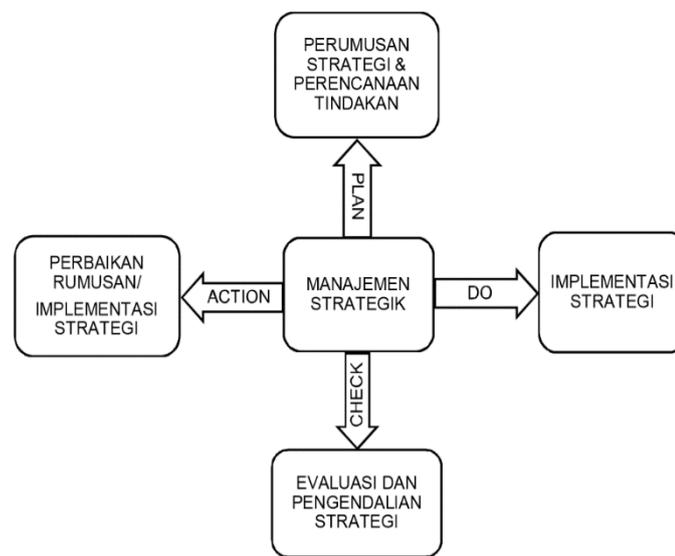
Gambar 2.1. Sebuah Model Dasar Dari Proses Manajemen Strategik



Berdasarkan definisi menurut Fred R David (2009:42), *Strategic Management Concept and Cases*, menyatakan bahwa: “Strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan organisasi. Strategi memiliki berbagai jabatan, seperti CEO, presiden, pemilik, ketua dewan, direktur eksekutif, rektor, dekan, atau pengusaha.” Selain dari itu, definisi dari strategi juga dapat dinyatakan dalam sumber yang sama, seperti menurut Fred R David, (2009:44), *Strategic Management Concept and Cases*, menyatakan bahwa: “Strategi adalah cara dimana tujuan jangka panjang akan tercapai. Strategi bisnis dapat mencakup

ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, penghematan, divestasi, likuidasi, dan *joint venture*.”.

Gambar 2.2. Manajemen Strategik PDCA



Manajemen strategik juga dapat dipandang sebagai proses untuk mengelola strategi agar rumusan strategi dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti kegiatan manajemen yang lain, kegiatan mengelola strategi perlu kegiatan PDCA (*Planning-Doing-Controlling-Actuating*), sehingga keseluruhan kegiatan manajemen strategi menjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar, manajemen srategik PDCA, yaitu terdiri dari kegiatan Perumusan Strategi, Pelaksanaan atau Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian Strategi serta Tindakan Perbaikan terhadap Rumusan dan

Implementasi Strategi. Dengan manajemen strategi tersebut diharapkan strategi benar-benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi. Dengan demikian manajemen strategik dapat didefinisikan, manajemen strategik adalah proses mengelola strategi yang terdiri dari tahapan perumusan-implementasi-evaluasi/pengendalian-perbaikan strategi, dengan tujuan agar strategi dapat diimplementasikan sehingga mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi.

Untuk menjalankan semua strategi yang telah disusun dengan rapih oleh suatu organisasi, maka terdapat proses yang harus dilakukan agar strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti pemrosesan manajemen strategis yang diungkapkan menurut Fred R David, (2009:37), *Strategic Management Concept and Cases*, menyatakan bahwa: Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap yaitu: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Kategori yang termasuk kedalam perumusan strategi adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi-strategi khusus untuk mengejar. formulasi strategi-isu termasuk memutuskan untuk masuk pada bisnis baru apa, bisnis apa yang layak untuk ditinggalkan, bagaimana cara mengalokasikan sumber daya, apakah perusahaan akan memperluas operasi atau diversifikasi, apakah baik untuk masuk kedalam pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk joint venture, dan bagaimana untuk menghindari permusuhan dalam pengambilalihan.

Implementasi strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan untuk periode tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya strategi-mendukung, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan, dan menghubungkan antara kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Pada tahap ini, manajer sangat perlu untuk mengetahui kapan waktunya strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik: evaluasi strategi merupakan alat utama untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi masa depan tunduk pada modifikasi karena faktor eksternal dan internal selalu berubah. Terdapat tiga dasar kegiatan strategi-evaluasi adalah (1) meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar untuk strategi sekarang, (2) pengukuran kinerja, dan (3) mengambil tindakan korektif. Strategi evaluasi diperlukan karena kondisi pada saat ini tidak menjamin keberhasilan dimasa depan. Sukses selalu menciptakan masalah baru dan berbeda: hingga kematian tiba pun harus puas akan pengalaman organisasi

Dua orang dari pakar Manajemen Strategis, A. Bakar Ibrahim dan Kamal Arghyed dalam Azhar Arsyad, (2003:26) mengemukakan definisi berikut:

“Strategic Management is the systematic and continuous process of selecting, implementing, and evaluating strategic choices. These decisions must be congruent with the organization’s mission, objective, and internal and external capabilities, for they will set the tone for the entire organization. . .”

Kata kunci dalam ungkapan di atas tidak terlepas dari kata *strategy* itu sendiri, misi, objektif, serta kapabilitas internal dan eksternal. Proses manajemen strategis menuntut para manajer untuk memeriksa dan mengontrol situasi lembaga atau perusahaannya secara periodik, mengevaluasi misi dan tujuannya, menilai lingkungan eksternalnya ditinjau dari sudut situasi ekonomi, perubahan struktur, kompetisi, inovasi teknologi di samping menilai kemampuannya ke dalam, seperti sumber daya manusianya, kualitas produksi atau luarannya, keterampilan dan teknik - teknik pemasarannya serta performan keuangan.

Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck (1997) dalam Iwan Purwanto (2007:75) Manajemen Strategis adalah:

”Sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis adalah cara dengan jalan mana para pencari strategi menentukan sasaran dan pengambilan keputusan”.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2005:15), dalam bukunya ”Manajemen Strategik” definisi manajemen strategik adalah:

”Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”.

Dari berbagai pengertian atau definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan /perencanaan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang.

Dalam merumuskan suatu strategi, manajemen puncak harus memperhatikan berbagai faktor yang sifatnya kritikal.

1. Strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi karena manajemen puncak menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi tersebut dan sasaran apa yang ingin dicapai. Yang jelas menonjol dalam faktor pertama ini ialah bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar.
2. Dalam merumuskan dan menetapkan strategi, manajemen puncak mengembangkan profil tertentu bagi organisasi. Profil dimaksud harus menggambarkan kemampuan yang dimiliki dan kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan.
3. Pengenalan yang tentang lingkungan dengan mana organisasi akan berinteraksi, terutama situasi yang membawa suasana persaingan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh organisasi apabila organisasi yang bersangkutan ingin tidak hanya mampu melaksanakan eksistensinya, akan tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya.
4. Suatu strategi harus merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. Dengan analisis yang tepat berbagai alternatif yang dapat ditempuh akan terlihat.

5. Mengidentifikasi beberapa pilihan yang wajar ditelaah lebih lanjut dari berbagai alternatif yang tersedia dikaitkan dengan keseluruhan upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
6. Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang dipandang paling tepat dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap mempunyai nilai yang paling strategik dan diperhitungkan dapat dapat dicapai karena didukung oleh kemampuan dan kondisi internal organisasi.
7. Suatu sasaran jangka panjang pada umumnya mempunyai paling sedikit empat ciri yang paling menonjol, yaitu:
 - a) sifatnya yang idealistik,
 - b) jangkauan waktunya jauh ke masa depan,
 - c) hanya bisa dinyatakan secara kualitatif, dan
 - d) masih abstrak.

Dengan ciri ciri seperti itu, suatu strategi perlu memberikan arah tentang rincian yang perlu dilakukan. Artinya, perlu ditetapkan sasaran antara dengan ciri-ciri:

- a) jangkauan waktu ke depan spesifik,
 - b) praktis dalam arti diperkirakan mungkin dicapai,
 - c) dinyatakan secara kuantitatif, dan
 - d) bersifat konkret.
8. Memperhatikan pentingnya operasionalisasi keputusan dasar yang dibuat dengan memperhitungkan kemampuan organisasi di bidang anggaran, sarana, prasarana, dan waktu.

9. Mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi berbagai persyaratan bukan hanya dalam arti kualifikasi teknis, akan tetapi juga berperilaku serta mempersiapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat dan martabat manusia dalam organisasi.
10. Teknologi yang akan dimanfaatkan yang karena peningkatan kecanggihannya memerlukan seleksi yang tepat.
11. Bentuk, tipe, dan struktur organisasi yang akan digunakan pun harus turut diperhitungkan, misalnya apakah akan mengikuti pola tradisional dalam arti menggunakan struktur yang hierarkial dan piramidal, ataukah akan menggunakan struktur yang lebih datar dan mungkin berbentuk matriks.
12. Menciptakan suatu sistem pengawasan sedemikian rupa sehingga daya inovasi kreativitas dan diskresi para pelaksana kegiatan operasional tidak "dipadamkan".
13. Sistem penilaian tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan strategi yang dilakukan berdasarkan serangkaian kriteria yang rasional dan objektif.
14. Menciptakan suatu sistem umpan balik sebagai instrumen yang ampuh bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi yang telah ditentukan itu untuk mengetahui apakah sasaran terlampaui, hanya sekedar tercapai atau bahkan mungkin tidak tercapai. Kesemuanya ini diperlukan sebagai bahan dan dasar untuk mengambil keputusan di masa depan.

Dari pembahasan di atas kiranya jelas bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya ialah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

B. Pembangunan Infrastruktur

Siagian (1994: 2) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Pembangunan mengandung arti yang luas, peningkatan produksi memang merupakan salah satu ciri produk dalam proses pembangunan, selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan mencakup perubahan komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (Alokasi), sumber daya produksi (Productive Resources) diantara sektor - sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pemabgian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (Institusional Framework) dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif.

Dalam melaksanakan pembangunan, sasaran yang ingin dicapai ada empat yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang,pangan,dan perumahan serta peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Terciptanya kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik,pendidikan,kesehatan,pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak.
3. Terjaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Terjaminnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek. (Suryana,2000: 29)

Sedangkan Bryant dan White (1987 : 132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada empat implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.

4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati

Pengertian Infrastruktur, menurut (Grigg 2000: 54) merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg 2000: 78).

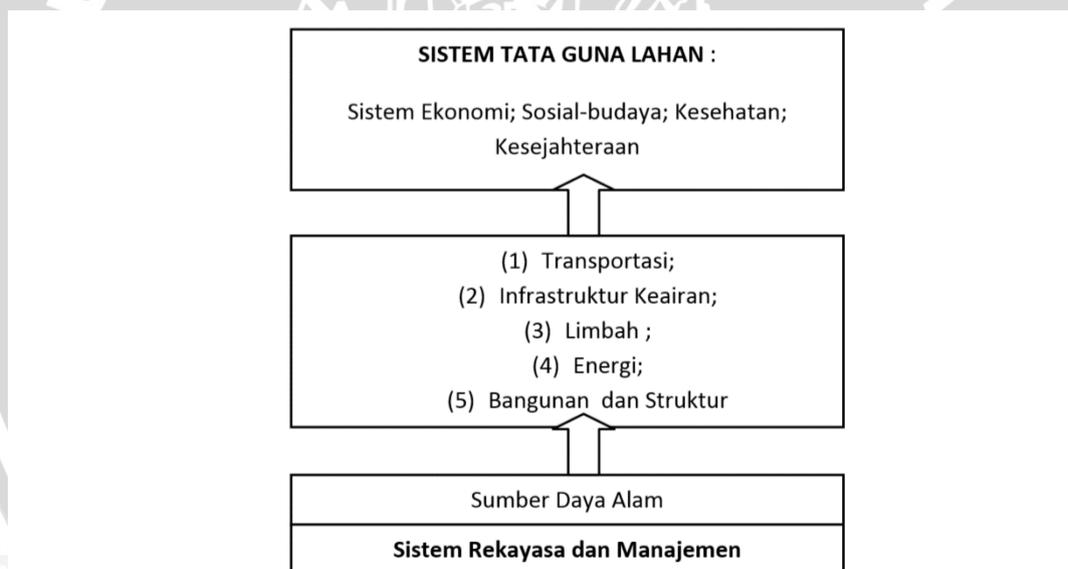
Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting (Kodoatie 2003:98).

Pembangunan sebagai proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dari tidak ada menjadi ada, pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana sebagai suatu sistem untuk membangun prasarana atau

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Gambar 1. Infrastruktur Sebagai Penopang/Pendukung Sistem Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan.



(Grigg dan Fontane, 2000)

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan

produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata guna lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane (2000) seperti pada gambar 3 diatas. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan, limbah, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.

C. Sanitasi Perkotaan

Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Dalam pengertian lain sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. sedangkan perkotaan adalah daerah atau kawasan kota, yang berasal dari kata kota yaitu daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.

Dari pengertian diatas sanitasi perkotaan dapat diartikan sebagai usaha membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dengan maksud pencegahan

manusia mengalami kontak dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya guna menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia dalam kawasan perkotaan.

D. Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*)

Community Based atau pendekatan yang Berbasis Masyarakat adalah upaya atau pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Tujuan dari pendekatan yang berbasis masyarakat adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dan mencoba untuk menurunkan kerentanan individu, keluarga dan masyarakat luas serta adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Disamping itu program berbasis masyarakat menggunakan pendekatan yang berbasis realita bahwa dengan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan, maka masyarakat di kalangan bawahpun dapat melakukan perubahan yang positif untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Pembangunan berbasis masyarakat menurut Parwoto (1997), proses kegiatan pembangunan partisipasi yang dalam hal ini tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan, permasalahan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku yang terlibat. Selain itu Maskun (1995), berpendapat bahwa pembangunan berbasis masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek - aspek humanisme dalam meningkatkan pertumpuhan masyarakat dengan mengandalkan kemampuan masyarakat untuk tujuan

menciptakan kondisi tumbuhnya suatu masyarakat yang berkembang secara swadaya.

E. Desa Wisata

Menurut Wiendu Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, 1993)

Menurut Edward Inskeep (1991:166), memberikan definisi desa wisata sebagai wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Pariwisata Inti Rakyat (PIR) (Hadiwijoyo, 2012) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai desa wisata apabila memiliki

beberapa komponen yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Atraksi

Atraksi, atau juga dikenal dengan istilah daya tarik wisata, di suatu desa adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Maksud dari pengertian di atas adalah keaslian kondisi desa tersebut yang menjadi daya tarik sebuah Desa Wisata, serta memungkinkan wisatawan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak biasa.

2. Fasilitas

Fasilitas adalah sumber daya yang khusus dibuat karena mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam aktivitasnya di Desa Wisata. Fasilitas-fasilitas yang dibuat ini dapat memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki desa, atau membuat sesuatu yang baru sesuai kebutuhan namun tidak meninggalkan karakteristik dan keunikan desa tersebut. Beberapa contoh fasilitas Desa Wisata yang umum adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Perkemahan

Menyediakan penyewaan alat-alat perkemahan seperti tenda, alat masak, sleeping bag, matras, senter, dan lain-lain. Selain itu, fasilitas perkemahan juga termasuk hal-hal lain seperti penyediaan jasa pemandu outbond, pemasangan tenda, kebersihan, dan lain-lain.

b. Fasilitas Makan - Minum

Fasilitas ini bertujuan mendukung aktivitas wisata yang ada di desa. Dengan beberapa pendekatan seperti kerja sama dengan beberapa rumah makan/warung makan/katering/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sekitar untuk melayani kebutuhan makan-minum wisatawan.

c. Pusat Jajanan dan Cenderamata

Fasilitas ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk membawa buah tangan ke tempat asalnya (*something to buy*). Selain itu, fasilitas ini merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang baik dari wisatawan. Sebaiknya fasilitas jajanan dan cenderamata ini dipusatkan dalam satu tempat/area yang cocok untuk terjadinya kegiatan jual-beli.

d. Pusat Pengunjung (*Visitor Center*)

Pusat pengunjung merupakan tempat dimana wisatawan dapat membeli tiket masuk, memperoleh berbagai informasi, dan membeli beragam cenderamata yang diproduksi oleh penduduk desa. Dengan kata lain, visitor center adalah dimana wisatawan diterima saat datang dan dilepas saat akan meninggalkan desa. Fungsi dari Pusat Pengunjung adalah :

- Sebagai titik pertemuan.
- Mempermudah wisatawan untuk mendapatkan pelayanan serta informasi-informasi lain yang dibutuhkannya

- Dapat berfungsi sebagai TIC (*Tourist Information Center*), sebuah tempat yang menyediakan informasi tentang Desa Wisata untuk para pengunjung di Desa Wisata tersebut
- Mempermudah wisatawan mendapatkan informasi tentang Desa Wisata
- Memberikan gambaran secara umum tentang Desa Wisata

Di dalam Visitor Center biasanya terdapat fasilitas-fasilitas lain seperti di bawah ini:

- *Ticket Office* (tempat pembelian paket-paket wisata dan produk-produk Desa Wisata lain yang ditawarkan)
- Informasi paket wisata
- Informasi gambaran umum desa setempat berupa brosur atau papan informasi
- Peta wisata
- Informasi tentang potensi wisata yang terdapat di Desa Wisata

3. Aktifitas Wisata

Aktivitas wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan selama keberadaan mereka di daerah tujuan wisata dalam waktu setengah hari sampai berminggu-minggu. Aktivitas di Desa Wisata dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik untuk menjadi pengalaman wisatawan. Misalnya dengan mengemas aktivitas menanam padi menjadi perlombaan menanam padi.

Beberapa aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Desa Wisata adalah sebagai berikut:

- a. Menikmati pemandangan.
 - b. Memasak dengan tungku.
 - c. Memancing.
 - d. Berburu.
 - e. Bersepeda santai.
 - f. Hiking , dan lain-lain
4. Pengembangan Umum

Pengembangan umum adalah sebuah upaya yang dilakukan berdasarkan perencanaan untuk menciptakan sebuah daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Beberapa upaya pengembangan umum yang utama dijelaskan di bawah ini.

a. Pembagian Zona/Area

Pembagian zona adalah pengelompokan area dalam beberapa zona yang sesuai dengan tata guna lahan. Pembagian zona memiliki fungsi untuk memudahkan pembangunan juga demi mendukung kerapihan pengelolaan Desa Wisata. Pembagian zona dapat dilakukan dengan membagi zona berdasarkan fungsinya, misalnya zona atraksi, zona fasilitas, zona akomodasi, dan zona asli (zona yang tidak dibangun untuk kepentingan pariwisata).

b. Pengelolaan Pengunjung

Pengelolaan pengunjung adalah pengaturan pola aktivitas, alur kedatangan hingga kepulangan wisatawan, dan lain-lain. Beberapa teknik dalam pengelolaan pengunjung, antara lain:

- Pembatasan terhadap jumlah area yang digunakan Hal ini selain untuk mengurangi resiko pengrusakan lahan yang lebih banyak, juga untuk memberikan privasi kepada penduduk setempat.
- Penyebaran area yang digunakan bagi wisatawan Wisatawan dapat melihat berbagai area dengan karakteristik yang berbeda sehingga tidak menimbulkan kebosanan dalam memperoleh pengalaman selama berada di desa wisata.
- Pemusatan area/pemusatan penggunaan lahan Teknik ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi pengontrolan kegiatan wisata pedesaan dan merupakan salah satu bentuk zonasi. Misalnya dengan adanya pusat penjualan oleh-oleh dan cinderamata yang dipisahkan dengan zona aktivitas.
- Pembatasan lama tinggal Pembatasan lama tinggal dilakukan untuk meminimalisir pengaruh dari hadirnya wisatawan. Karena apabila wisatawan tinggal terlalu lama di sebuah desa, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap budaya lokal.
- Pemanfaatan area secara bergantian/musiman Pemanfaatan area yang sama dari waktu ke waktu dapat menyebabkan beberapa hal seperti kejenuhan wisatawan terhadap produk wisata desa, ketidakmampuan daya dukung lahan terhadap aktivitas wisata yang dapat menimbulkan kerusakan lahan. Selain itu, berkaitan dengan lahan pertanian, biasanya produk paket wisata disesuaikan dengan musim pertanian yang ada.

- Pembatasan jumlah pengunjung Desa Wisata cenderung lebih baik dijadikan bentuk pariwisata minat khusus sehingga jumlah wisatawan yang datang merupakan wisatawan dari kalangan dan hobi tertentu. Apabila jumlah wisatawan yang datang sangat banyak, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- Penentuan harga masuk Teknik ini bertujuan untuk mengontrol masuknya wisatawan ke desa, sehingga dapat diketahui jumlah kunjungannya. Selain itu, teknik penentuan harga masuk ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.
- Pengaturan arus pengunjung Pengaturan arus pengunjung ini salah satunya dapat dilakukan dengan paket wisata, dimana wisatawan telah memiliki alur tersendiri untuk mengunjungi berbagai daya tarik wisata di desa. Penjelasan lebih lanjut mengenai paket wisata dapat dilihat di bagian selanjutnya.

Dengan menerapkan teknik-teknik pengelolaan pengunjung dengan baik, tentunya dapat memberikan manfaat terhadap berbagai aspek dalam desa. Manfaat dari pengelolaan pengunjung ialah:

- Menambah pengalaman wisatawan Pengelolaan pengunjung dapat menambah pengalaman wisatawan dengan salah satu teknik seperti pengelolaan jalur/rute sehingga lebih banyak area yang dapat dilihat wisatawan.
- Menambah citra Desa Wisata Dengan kualitas pengelolaan pengunjung yang baik, akan memberikan kesan positif terhadap desa

itu sendiri. Selain itu, pencitraan yang baik juga dapat meningkatkan kebanggaan dalam diri warga terhadap desanya sendiri.

- Menciptakan lingkungan yang baik Pengelolaan pengunjung yang baik akan melahirkan lingkungan lokal yang nyaman, baik bagi wisatawan maupun penduduk lokal, dan sekitarnya.
- Meminimalkan dampak-dampak negatif, khususnya bagi masyarakat lokal Pengelolaan pengunjung banyak bermanfaat untuk melindungi budaya, sosial, agama dari penduduk asli desa tersebut dari pengaruh negatif yang dibawa oleh wisatawan.

c. Pelayanan Interpretasi

Pelayanan interpretasi adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi melalui berbagai media penyampaian baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa teknik interpretasi yaitu:

- Brosur dan Selebaran

Media interpretasi dalam bentuk brosur dan selebaran merupakan bentuk yang paling umum digunakan sekaligus lebih mudah disebarluaskan.

- Pemandu Wisata

Pemandu wisata merupakan media langsung dalam interpretasi karena pemandu wisata dapat menyampaikan informasi secara personal kepada wisatawan. Apabila pemandu wisata dapat menyampaikan informasi dengan baik, maka teknik ini merupakan teknik yang paling efektif dilakukan.

- Perjalanan wisata yang dipandu

Adanya perjalanan wisata yang dipandu merupakan salah satu teknik yang efektif dalam penyampaian informasi dalam teknik interpretasi dimana wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai berbagai tempat yang dikunjungi

- *Tourist Information Centre (TIC)*

TIC atau pusat informasi wisatawan adalah sebuah tempat yang menyediakan berbagai informasi- informasi umum hingga khusus mengenai desa dalam berbagai bentuk, seperti peta wisata, buku, media pemasaran, dan lain-lain.

- Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik interpretasi yang memberikan peluang bagi wisatawan untuk memberikan timbal balik terhadap segala kegiatan di Desa Wisata. Untuk itu, kuesioner biasa diberikan di akhir kunjungan wisatawan ke desa.

Pelayanan interpretasi diberikan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Tujuan utama interpretasi adalah:

- a) Memberikan kenyamanan dan memberikan pengalaman pendidikan bagi wisatawan
- b) Meningkatkan apresiasi dan pengertian wisatawan terhadap Desa Wisata.
- c) Meningkatkan kemampuan pihak pengelola dan pelaksana Desa Wisata dalam berkreasi menginterpretasikan desanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari jawaban atas suatu masalah secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan - aturan yang berlaku. Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok - pokok perumusan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penggolongan jenis penelitian akan sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono (2001:6) "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain." Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian di analisis dan diinterpretasikan

Dari beberapa pendapat diatas, berdasarkan pada permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu yang akan diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran terhadap suatu fenomena yang akan diteliti secara sistematis dan lebih mendalam dengan mengolah data-data yang didapat dilapangan. Dalam hal ini adalah penggambaran atau penjelasan mengenai **“Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Pandanrejo Kota Batu) “**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berkaitan dengan masalah data yang akan dikumpulkan, diolah dan kemudian dianalisis. Fokus ini sangat penting bertujuan untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas dan mempertajam bahasan. Disamping itu, penentuan fokus berguna untuk membantu peneliti dalam menyaring informasi yang masuk atau berkaitan dengan data - data yang dianggap relevan.

Menurut Moleong (2007:28), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Sedangkan tujuan dari pengambilan fokus penelitian adalah:

1. Untuk membatasi studi, Misalnya jika kita membatasi diri dari upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak diperlukan lagi.
2. Untuk memenuhi kriteria masukkan dan mengeluarkan informasi dari lapangan. Sehingga dengan menetapkan fokus yang jelas , peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat tentang data yang akan digunakan dan yang tidak digunakan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.
 - a. Perencanaan pembangunan IPAL SPBM
 - b. Implementasi pembangunan IPAL SPBM
 - c. Evaluasi pembangunan IPAL SPBM
2. Faktor penghambat Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.
 - a. SDM masyarakat desa yang kurang
 - b. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana penelitian menangkap kegiatan sebenarnya dari objek yang diteliti, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mengetahui fenomena yang secara praktis sesuai kenyataan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kota Batu Jawa Timur. Hal ini karena lokasi penelitian yang memang menarik minat peneliti dikarenakan peneliti merupakan warga Kota Batu yang peduli dan ingin memberikan kontribusi berupa penelitian guna mengembangkan Kota Batu. Adapun situs dari penelitian sendiri adalah Bumdes Pandanrejo Kota Batu. Hal ini dikarenakan Desa Pandanrejo merupakan Desa Wisata yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Kota Batu melalui pariwisata agrowisata.

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan. Data primer juga diperoleh dari hasil observasi terhadap gejala atau proses yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Data Primer tersebut diperoleh dari:

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Ketua BKM Desa Pandanrejo

2. Data sekunder

Merupakan data yang akan melengkapi data - data yang diperoleh dari data primer diantaranya berupa dokumen, laporan, arsip organisasi yang terdapat kaitanya dengan masalah yang diteliti. Selain itu data yang diambil bisa berasal dari internet, surat kabar dan jurnal - jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2011:174), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki langsung di lapangan, dengan mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Moleong,2007:135).

Adapun Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas masalah penelitian, yaitu:

- a. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa - peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti
- b. Pedoman wawancara atau interview guide, digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.
- c. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

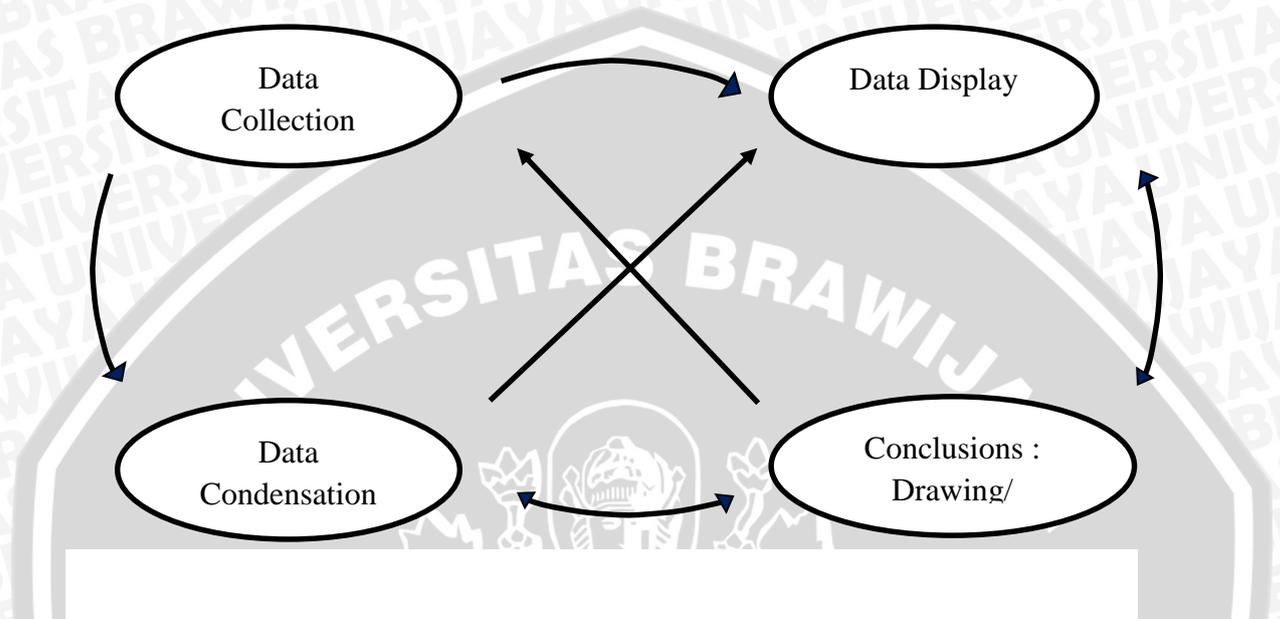
Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Strategi Pembangunan Insfrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata di Bumdes Pandanrejo.
2. Memaparkan informasi/fakta yang kemudian akan dianalisa dan dipaparkan hasilnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Pembangunan Insfrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata di Bumdes Pandanrejo.
3. Penarikan kesimpulan dengan menguji validitas data sebelumnya agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal diatas analisa dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 komponen. Gambar alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles,Huberman, dan Saldana (2014:14) dibawah ini:

Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Analisis Miles,Huberman,Saldana 2014:14

Berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles Huberman dan Saldana agar penulisan skripsi dapat lebih terarah, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu laporan-laporan dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilah-pilah hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang hal yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data yang digunakan oleh

peneliti adalah mengumpulkan data-data tentang kepegawaian serta menganalisa data-data sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan membedakan perubahan wujud dari bentuk laporan- laporan sampai data tersebut siap disajikan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian melihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah kemudian di sajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Kota Batu

a. Geografis dan Iklim

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta mengevaluasi proyek - proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah ini semakin meningkat kesejahterannya Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut ini dikarunia keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas. Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional. Gunung - gunung tersebut adalah Gunung Panderman (2010 mdpl), Gunung Welirang (3156 mdpl), Gunung Arjuno (3339 mdpl) dan masih banyak lagi lainnya. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata kota Batu 21,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. Rata - rata kelembaban nisbi udara 86% dan kecepatan angin

10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di Kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari.

Kota Batu memiliki tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji dengan luas wilayah 130.182 km²; Kecamatan Batu dengan luas wilayah 46.773 km²; dan Kecamatan Junrejo dengan luas wilayah 26.234 km². Sehingga total luas Kota Batu adalah 202.800 km². Secara astronomis terletak di 112°17'10,90"-122°57'11" Bujur Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45 Lintang Selatan. Sedangkan batas administratif wilayahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Selatan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
- Sebelah Timur Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Sebelah Barat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Berdasarkan Hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2002, jumlah penduduk kota Batu tercatat sebesar 163.393 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 806 jiwa/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 49,33 5 adalah penduduk laki-laki dan 50,67% adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 97,37%. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, hal ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 35,78%. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 44,67% atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 44 orang bukan

usia produktif (0-14 tahun) dan 64 tahun ke atas atau dengan ratio 2:1. Dari data kependudukan di atas maka Kota Batu dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

Kota Batu merupakan daerah otonom yang termuda di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Luas Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 % dari total luas Jawa Timur. Daerah lereng dan berbukit memiliki proporsi lebih luas dibandingkan dengan daerah dataran. Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44',55,11' sampai dengan 8°26',35,45' Lintang Selatan dan 122°17',10,90' sampai dengan 122°57',00,00' Bujur Timur.

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu : Andosol, Kambisol, Alluvial, Latosol. Dari keempat kategori tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Sedangkan kondisi hidrologinya Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai yang mengalir di pusat Kota yaitu Sungai Brantas dan air tanah yang cukup melimpah.

Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan. Kondisi

topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori yaitu mulai dari 600 MDPL sampai dengan lebih dari 3000 MDPL. Dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 Ha. Kemiringan lahan (*slope*) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25-40 % dan kemiringan >40 %.

Seperti halnya daerah lain di Jawa Timur, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2014 di bulan September dan Oktober tidak terjadi hujan. Jumlah hari hujan paling kecil pada bulan Agustus dan paling besar pada bulan Januari dan Desember, tetapi curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu mencapai 412 mm. Hal ini menyebabkan kondisi cuaca tahun 2014 lebih kering dibandingkan tahun 2013.

Pada tahun 2014 Kota Batu memiliki suhu minimum 17,5 - 21,4°C dan suhu maksimum antara 24,0 - 30,3°C dengan kelembaban udara sekitar 70 - 86 % disertai kecepatan angin tertinggi 79,2 km/jam, oleh karenanya Kota Batu tidak memiliki perubahan musim yang drastis antara musim kemarau dan musim penghujan.

b. Pemerintahan

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk yang kedua kalinya dengan masa bakti 2013 - 2018. Secara

administratif Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 Kelurahan/Desa. Selama periode 2010 - 2013, baik jumlah kecamatan, Desa dan Kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8 Desa/Kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan. Semua desa/kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT/RW, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya.

c. Kependudukan

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km², maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,14 persen. Selama periode 2012 hingga 2014, pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan

Batu mencapai 2.012 jiwa per km², hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan hutan dan daerah lereng gunung.

Secara umum jumlah penduduk laki - laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kota Batu terdapat 101 penduduk laki - laki. Struktur penduduk Kota Batu dapat dilihat pada Piramida Penduduk Kota Batu. Pada kelompok umur 20 - 24 tahun jumlah penduduk Kota Batu menunjukkan jumlah terbesar yaitu sebanyak 16.318 jiwa.

Dari struktur penduduk menurut kelompok umur dapat diketahui sejauh mana tingkat ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif. Usia produktif adalah kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun, sedangkan usia tidak produktif pada kelompok umur 0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Gambaran tersebut yang dinamakan Angka Beban Ketergantungan. Pada tahun 2014 angka ketergantungan secara keseluruhan adalah 47,06 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) akan menanggung sekitar 47 orang bukan usia produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 - 64 tahun mencapai 130.283 jiwa atau 67 persen. Secara keseluruhan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif di Kota Batu banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik yaitu sebanyak 2.341 pasangan atau

sekitar 49 persen lebih dari PUS yang aktif. Pada tahun 2014 pengguna alat kontrasepsi suntik mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 3,35 persen.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kota Batu

a. Visi

Berdasarkan mandat yang diberikan dalam tugas pokok dan fungsi serta visi Kepala Daerah maka visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

“Menjadi lembaga yang baik, bersih berkualitas, inovatif dan tanggap dalam memberdayakan masyarakat, keluarga dan perempuan menuju masyarakat pertanian berbasis pariwisata yang sejahtera “.

b. Misi

Sebagaimana gambaran tugas pokok untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan , adapun misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, KB dan kesejahteraan ibu/ anak dan , keluarga.
- Pengembangan data yang akurat dan keterpaduan perencanaan dan pengambilan kebijakan .
- Pengembangan desa berdaya yang bertumpu pada penciptaan daya saing dengan , penciptaan kesejahteraan keluarga.
- Pengembangan kader pemberdayaan masyarakat, gender, KB, dan kesejahteraan keluarga melalui sekolah inovator kader pemberdayaan.

- Penciptaan Pusat Pengembangan, Pengetahuan dan Teknologi Lokal (knowledge shelter) untuk pusat pembelajaran (learning center) teknologi tepat guna dan pertukaran kearifan lokal dari berbagai sumber untuk pemberdayaan ekonomi produktif dan peningkatan peran perempuan menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- Pengembangan pusat perlindungan hak – hak anak, perempuan, dan kesejahteraan keluarga melalui gerakan cinta keluarga
- Pengembangan PKK sebagai motor pemberdayaan , pengarusutamaan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan , ibu dan anak

c. Tujuan dan Sasaran

Bapemas Kota Batu memiliki tujuan yaitu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan Sasaran strategis yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan sebagai berikut :

- Terwujudnya sinergitas organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana serta meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera
- Terwujudnya Validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/ kelurahan , data base keluarga berencana , data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah serta pembinaan aparatur desa

- Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat (bottom up planning) dengan kebijakan perencanaan makro (top down planning) melalui pendekatan sosial budaya dan serta peningkatan ketrampilan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan kegiatan kegiatan PKK

d. Strategi

Strategi pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana akan ditempuh melalui :

- Pemberdayaan yang bertumpu pada individu, kelompok, masyarakat, dimaksudkan dengan melibatkan unsur – unsur tersebut dapat bersinergi dan cepat merespon terhadap perubahan dan pencapaian tujuan yang diinginkan
- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan ketrampilan wira usaha dan pendampingan dengan pemafaatan TTG
- Pembelajaran dan pelatihan kader untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kesetaraan gender serta perlindungan anak dan perempuan ,dan meningkatkan kapasitas individu, keluarga, Tokoh masyarakat , dan lain sebagainya sehingga mereka mampu berperan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan keluarga.

- Adanya keterpaduan keselarasan program pusat dan daerah dalam hal program-KB dan pemberdayaan masyarakat dan perempuan .

e. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dilakukan dengan strategi kebijakan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu yang meliputi

- Mengkoordinasikan dan sinkronisasi Program
- Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur, Tokoh Masyarakat, Stakeholders dan masyarakat yang menjadi sasaran program
- Mengembangkan usaha dan lembaga ekonomi dan ketrampilan masyarakat yang menjadi sasaran program
- Meningkatkan pelayanan Kb untuk masyarakat kurang mampu
- Mengembangkan pola kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan stakeholders
- Mengembangkan data yang akurat tentang jumlah masyarakat miskin, peserta KB, perempuan korban kekerasan
- Meningkatkan pelayanan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayahnya sendiri melalui ketrampilan dan pelatihan pelatiha kewira usahaan.

f. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu menyatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Sedangkan fungsi nya:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan sejahtera;
- pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

g. Tugas per bagian

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2008:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- Perumusan, penyusunan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Penyusunan dokumen anggaran;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan dan instansi terkait;
- Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan serta kearsipan.

Sekretariat berfungsi:

- Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Penyusunan Penetapan Kerja;
- Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan serta perpustakaan;
- Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan Badan;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan

Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan berfungsi:

- Penyusunan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
- Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- Pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- Pengembangan pertanian pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
- Penguatan kelembagaan kemasyarakatan;
- Penyelenggaraan pelatihan masyarakat;
- Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- Peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

4) Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan

mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan adat, pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna berfungsi:

- Penyusunan kebijakan pemberdayaan adat, pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara;
- Pemberdayaan perempuan;
- Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- Peningkatan kesejahteraan sosial;
- Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja;
- Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan, pemanfaatan lahan perdesaan, prasarana dan sarana perdesaan, dan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna;
- Pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5) Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Bidang Keluarga Berencana berfungsi:

- Penyusunan dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan yang meliputi:
 - a) Jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - b) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan perlindungan hak-hak reproduksi.
 - c) Pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 - d) Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
 - e) Advokasi dan Komunikasi, Informaasi dan Edukasi (KIE).
 - f) Data Mikro kependudukan dan keluarga.
 - g) Penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan.
- Pembinaan pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha, data dan informasi gender dan anak.

- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi:
Penyusunan dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Penguatan dan pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- Pengintegrasian dan koordinasi kebijakan kualitas dan perlindungan hidup perempuan dan anak;
- Pengembangan data dan informasi gender dan anak;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi

h. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Unsur Pembantu pimpinan terdiri dari:
 - a) Sekretaris Badan terdiri dari:

- Kasubag Umum Kepegawaian;
- Kasubag Keuangan;
- Kasubag Program dan Pelaporan.

3) Unsur Pelaksanaan terdiri dari:

a) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- Kasubid Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
- Kasubid Pemberdayaan Keluarga dan Advokasi KIE

b) Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan terdiri dari:

- Kasubid Kelembagaan dan Pengembangan partisipasi masyarakat;
- Kasubid Usaha Ekonomi Kerakyatan;

c) Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

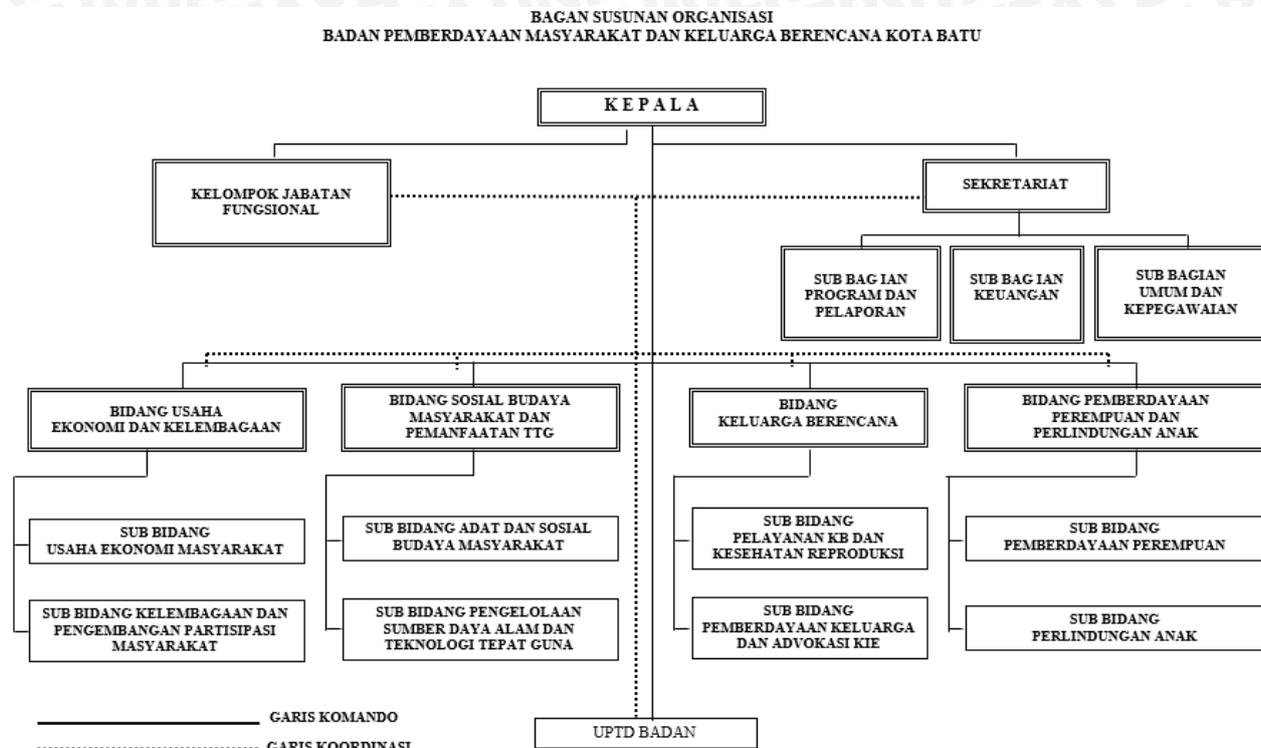
- Kasubid Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
- Kasubid Pengelolaan Sumber Daya Alam

d) Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- Kasubid Pemberdayaan Perempuan;
- Kasubid perlindungan anak

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Batu



Sumber: RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2012– 2017

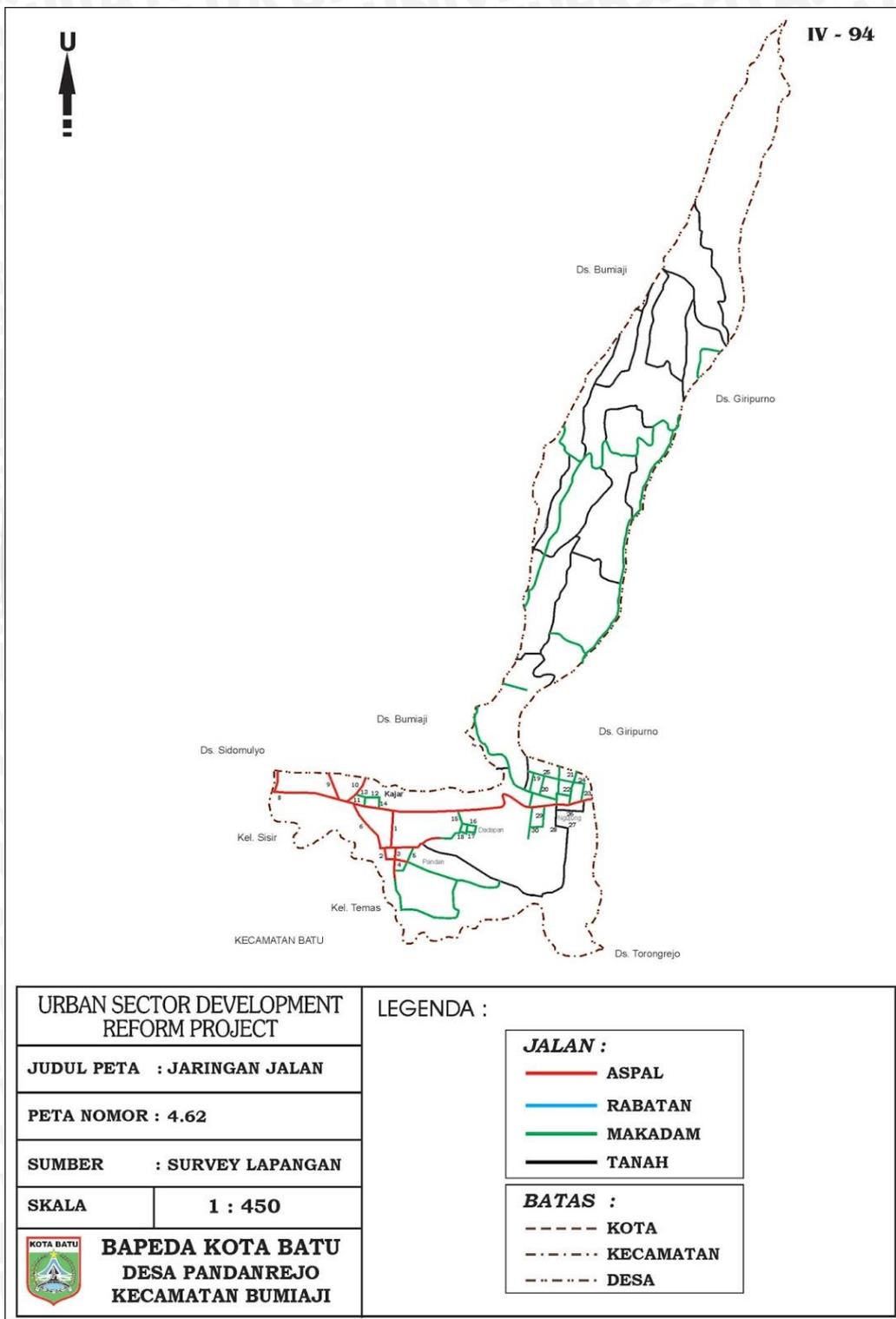
3. Profil Desa Pandanrejo

Secara administrasi Desa Pandanrejo adalah satu Desa yang ada di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 6.625km² dan terbagi menjadi 11 RW, 58 RT, dan 4 Dusun

1. Dusun Ngujung
2. Dusun Dadapan
3. Dusun Kajar
4. Dusun Pandan

Berikut ini merupakan gambar administratif Desa Pandanrejo:

Gambar 4.2. Peta Pandanrejo



Sumber: BAPEDA Kota Batu

Untuk batas wilayah pada masing – masing daerah di Desa Pandanrejo dapat dilihat sebagai berikut :

1. Utara : Desa Bumiaji
2. Selatan : Kelurahan Sisir
3. Barat : Desa Sidomulyo
4. Timur : Desa Giripurno

Sedangkan untuk orbitasi dan waktu tempuh pusat pemerintahan Desa Pandanrejo dengan pusat- pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dengan Kecamatan : 3 Km
- b. Jarak dengan Pusat Kota : 4 Km
- c. Jarak dengan Pemerintahan provinsi : 110 Km

Desa Pandanrejo untuk luas keseluruhan wilayahnya adalah 6.625Km². desa Pandanrejo ini terletak di kaki gunung sebelah selatan Gunung Arjuna, dengan ketinggian wilayahnya 700-800 MDPL. Suhu udara rata – ratanya 17° - 25° C. sedangkan kondisi keadaan tanahnya yang subur menjadikan matapencaharaian sebagian besar penduduk desa Pandanrejo adalah mayoritas petani.

Untuk jumlah penduduk secara terinci Desa Pandanrejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Data Jumlah Penduduk dan Luasan RW di Desa Pandanrejo

No	Wilayah RW	Luas lahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	RW 01 Dusun Ngujung	30ha	647	21.5
2	RW 02 Dusun Ngujung	27ha	514	19.1
3	RW 03 Dusun Ngujung	25ha	659	26.3
4	RW 04 Dusun Dadapan	7ha	457	65.3
5	RW 05 Dusun Dadapan	8.5ha	349	41.1
6	RW 06 Dusun Kajar	18ha	375	20.8
7	RW 07 Dusun Kajar	5ha	300	60
8	RW 08 Dusun Kajar	12ha	310	25.8
9	RW 09 Dusun Pandan	12ha	140	11.7
10	RW 10 Dusun Pandan	11.5ha	151	13.1
11	RW 11 Dusun Pandan	12.6ha	184	14.6

Sumber: CSIAP (*Community Sanitation Action Plan*) Desa Pandanrejo 2103

4. Program SPBM

Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri* (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat

melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Program SPBM ini dilaksanakan dalam rangka mendukung salah satu upaya pencapaian target *MDG's* pada 2015, yaitu menurunkan sebesar 50% dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar serta sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah. Program SPBM USRI dilaksanakan secara bertahap di 1.350 lokasi sasaran pada 34 kabupaten/kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Lokasi sasaran kegiatan SPBM USRI adalah kelurahan yang terletak didaerah perkotaan dan memiliki ciri-ciri daerah kota diutamakan yang berada di zona kritis atau merah (sesuai dengan SSK) serta mendukung program sanitasi didaerah perkotaan tersebut. Selain itu kelurahan penerima program SPBM USRI sebelumnya telah menerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, program SPBM USRI akan menggunakan lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak serta kinerja yang baik didalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.

Program SPBM dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat khususnya masyarakat miskin (terutama kaum perempuan dan kelompok

rentan/marjinal) yang tinggal di daerah berpenduduk padat, kumuh dan termasuk pada lingkungan yang rawan sanitasi (menurut SSK).

a. Visi

Berkurangnya angka kemiskinan melalui peningkatan akses sarana sanitasi di lokasi sasaran.

b. Misi

Sedangkan misi SPBM adalah:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sadar sanitasi untuk hidup bersih dan sehat.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak dan berkualitas.

c. Strategi

Dalam upaya pelaksanaan program SPBM dengan capaian keberlanjutan, maka pelaksanaan SPBM mengacu pada Strategi Sanitasi Kota (SSK).

- 1) Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.
 - Memobilisasi TFL untuk mendampingi masyarakat untuk melaksanakan pemetaan kemiskinan (sanitasi, identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, mengevaluasi kemampuan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan, menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif).

- Membentuk KSM, menyusun rencana pembangunan dan rencana investasi yang akan didanai dari BLM, menyiapkan DED, melaksanakan pekerjaan fisik, merumuskan dan melaksanakan rencana kegiatan O&P.

2) Penyediaan BLM untuk Pembangunan sarana sanitasi yang berkelanjutan: Pembangunan IPAL Komunal dengan sistem perpipaan IPAL Komunal dengan sistem perpipaan dan kombinasi MCK dengan perpipaan.

d. Kebijakan Pelaksanaan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, pelaksanaan program perlu didukung dengan kebijakan pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkembangkan keswadayaan masyarakat secara berkelanjutan
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif dan mendorong terciptanya kemitraan berbagai pihak dalam mendorong tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

- 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia di perkotaan untuk mengembangkan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan
- 5) Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan potensial perkotaan untuk pertumbuhan ekonomi.
- 6) Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan keberlanjutan program.

e. Tujuan Penyelenggaraan Program SPBM.

Program SPBM ini memiliki Tujuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan.
- 3) Menyediakan sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

f. Sasaran Program SPBM.

Sasaran Program SPBM ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat melalui kegiatan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- 2) Terbangunnya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal) yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan .
 - 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana/sarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal) secara partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.
 - 4) Tersusunnya Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (*Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP*) yang responsif kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.
 - 5) Meningkatnya kemampuan perangkat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan khususnya di sektor penyehatan lingkungan permukiman.
- g. Ruang Lingkup Program SPBM.

Ruang lingkup Program SPBM ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi: (i) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dengan sistem perpipaan dan/atau (ii) kombinasi MCK dan perpipaan.
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat.

Kegiatan penyehatan lingkungan permukiman melalui penyediaan sistem sanitasi komunal berbasis masyarakat dilaksanakan secara terpadu, mengacu pada

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), PJM Pronangkis / Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (*Medium Term Poverty Reduction Plan / MTPRP*) dan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (*Community Sanitation Improvement Action Plan / CSIAP*) yang telah disusun.

h. Prinsip dasar Program SPBM.

Prinsip dasar Program SPBM ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti program akan bersaing mendapatkan program dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai dengan pilihannya.
- 2) Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, peran pemerintah dan konsultan pendamping hanya sebatas sebagai fasilitator.
- 3) Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh konsultan pendamping yang mempunyai pengalaman dalam bidang teknologi pengolahan limbah dan pendampingan sosial.
- 4) Pemerintah berperan memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat, bukan sebagai pengelola sarana.

i. Prinsip penyelenggaraan Program SPBM

Prinsip penyelenggaraan Program SPBM ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Dapat diterima

Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah kelurahan sehingga didukung dan diterima oleh masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan program.

2) Transparan

Penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat dan perangkat pemerintah daerah sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan dan evaluasi oleh semua pihak.

3) Dapat dipertanggungjawabkan

Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

4) Berkelanjutan

Penyelenggaraan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

5) Kerangka Jangka Menengah

Penyelenggaraan dilaksanakan pada kerangka jangka menengah sebagai dasar upaya peningkatan akses terhadap pelayanan prasarana dan sarana sanitasi bagi penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marginal.

6) Sederhana

Tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bersifat sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder

j. Pendekatan yang digunakan Program SPBM.

Program SPBM merupakan program pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, dengan pendekatan:

1) Pemberdayaan Masyarakat.

Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.

2) Keberpihakan kepada penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal.

Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan ditujukan kepada kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah.

3) Otonomi dan Desentralisasi.

Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab penuh pada penyelenggaraan program dan keberlanjutan prasarana/sarana terbangun.

4) Partisipatif

Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan & pemanfaatan,

dan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif perempuan serta kelompok rentan/marginal dan penduduk miskin.

5) Keswadayaan

Masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta pemeliharaan hasil kegiatan.

6) Keterpaduan Program Pembangunan

Program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain.

7) Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman.

8) Kesenjangan dan Keadilan Gender

Terdapat kesetaraan antara kaum pria dan dan perempuan dalam setiap tahap pembangunan dan dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan secara adil.

5. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

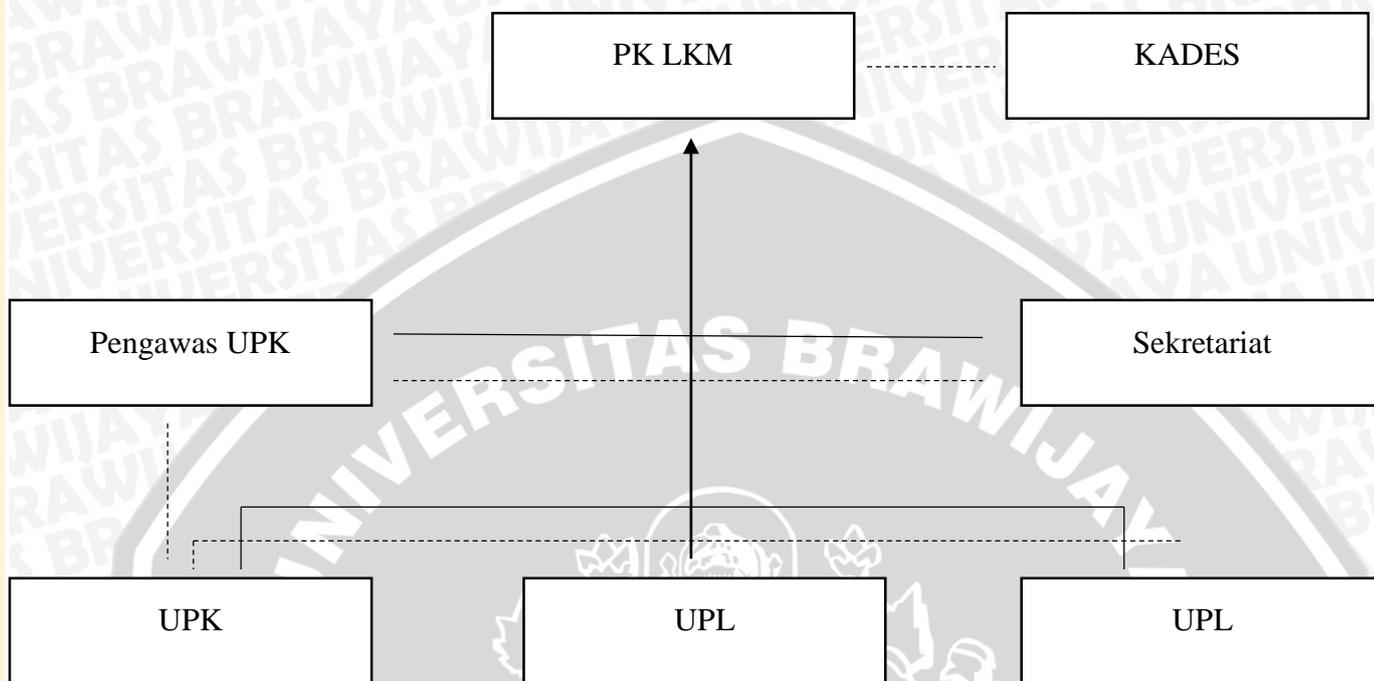
Sesuai dengan prinsip keterpaduan program, maka pelaksanaan kegiatan SPBM akan menggunakan lembaga masyarakat yang sudah ada dan telah berperan aktif dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP), yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di lokasi kelurahan sasaran. BKM/LKM adalah penanggung jawab

pelaksanaan Program SPBM di tingkat masyarakat. Secara rinci tugas BKM/LKM dalam Program SPBM adalah:

- a. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai Program SPBM secara terus menerus di tingkat masyarakat.
- b. Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman di tingkat kelurahan.
- c. Menyelenggarakan rembuk masyarakat kelurahan dan rembuk warga.
- d. Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan
- e. Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (Community Sanitation Improvement Action Plan) bersama-sama dengan Pokjasa kelurahan.
- f. Memfasilitasi pembentukan KSM Sanitasi dan KPP.
- g. Bersama KSM menyusun dan mengajukan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).
- h. Mengajukan CSIAP dan RKM kepada DPIU untuk diverifikasi.
- i. Membuka rekening atas nama BKM/LKM dengan tanda tangan 2 (dua) orang dari BKM/LKM, disarankan agar KSM juga ikut bertanda tangan sehingga jumlah yang bertanda tangan di buku rekening menjadi 3 (tiga) orang.
- j. Menjamin dan memfasilitasi terlaksananya transparansi kegiatan.
- k. Menandatangani kontrak kerja (SP3) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- l. Melakukan pengajuan pencairan dana BLM kepada PPK

- m. Membuat Buku Kas Umum disertai dengan bukti-bukti pengeluaran berdasarkan laporan yang dibuat oleh KSM.
- n. Menyusun laporan keuangan berdasarkan laporan penggunaan dana yang dibuat oleh KSM.
- o. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik.
- p. Mengelola pengaduan masyarakat.
- q. Mendampingi KSM dalam menyelenggarakan rebug warga untuk menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- r. Mempublikasikan laporan setiap bulan kemajuan kegiatan melalui papan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak.
- s. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan dibantu KSM Sanitasi.
- t. Bersama KSM menyelenggarakan rebug warga RT/RW IV untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan dana BLM.
- u. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan SPBM.

Gambar 4.3. Struktur Organisasi BKM



Sumber: BKM “Bhakti Sejahtera” Desa Pandanrejo 2013

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

A. Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata

a. Perencanaan pembangunan IPAL SPBM

Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to the PNPM Mandiri* yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut



berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap penyiapan warga, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Keterwakilan perempuan dalam setiap kelompok / institusi / lembaga dan tahapan bersifat mutlak. Program SPBM ini dilaksanakan dalam rangka mendukung salah satu upaya pencapaian target MDG's pada 2015, yaitu menurunkan sebesar 50% dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar serta sasaran RPJM 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah. Secara bertahap dilaksanakan di 1.350 lokasi sasaran yang berada di 34 Kabupaten / Kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut telah menerima dana BLM minimal sebanyak satu kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.

Uraian di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Paina, SE selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi pada tanggal 29 Februari 2016 jam 09.00 mengatakan bahwa:

“Program SPBM ini dilaksanakan untuk mendukung salah satu upaya pemerintah dalam pencapaian MDG’s (*millenium Development Goals*), yaitu tentang pemenuhan akses air minum dan sanitasi dasar yang didanai oleh ADB (*Asian Development Bank*). Selain itu untuk mengkampanyekan PHBS, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan buruk BABS, dan melibatkan masyarakat secara utuh dalam program pemerintah.”

1) Kondisi Kesehatan Masyarakat

Perilaku berperan penting dalam menentukan derajat kesehatan selain ketiga faktor lainnya seperti lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan maupun genetika masih dapat dipengaruhi oleh perilaku. Selain itu banyak penyakit yang muncul diakibatkan dari perilaku yang tidak sehat dan kondisi sanitasi lingkungan yang jelek. Pada tahun 2003 sampai dengan 2008 angka kejadian penyakit berbasis lingkungan (ISPA, Diare, TBC, Kulit, Mata dan Demam berdarah) di Kota Batu terjadi peningkatan (khususnya Diare). Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi masih memerlukan perhatian yang serius.

Tabel 4.2. Data Jenis Penyakit Berbasis Lingkungan

No	Kelurahan / Desa	2008		2007		2006	
		Diare	Kulit	Diare	Kulit	Diare	Kulit
KEC. BATU							
1	Kel. Ngaglik	180	193	89	185	178	150
2	Kel. Temas	185	232	92	169	93	147
3	Kel. Sisir	193	263	112	229	199	168
4	Kel. Songgokerto	141	177	89	140	80	126
5	Desa Pesanggrahan	192	221	106	235	376	213
6	Desa Oro – Oro Ombo	149	177	105	156	111	111
7	Desa Sumberejo	180	193	89	117	157	122
8	Desa Sidomulyo	168	187	83	112	104	125
KEC. BUMIAJI							
9	Desa Bumiaji	236	0	197	3	236	12

10	Desa Pandanrejo	110	15	135	11	75	15
11	Desa Giripurno	250	97	220	70	346	36
12	Desa Punten	137	5	130	4	102	2
13	Desa Bulukerto	291	124	148	16	181	57
14	Desa Sumbergondo	132	30	126	23	164	30
15	Desa Gunung Sari	161	1	138	12	130	6
16	Desa Tulungrejo	248	3	203	18	273	29
17	Desa Sumberbrantas	79	38	60	30	0	0
KEC. JUNREJO							
18	Desa Beji	211	436	205	142	157	116
19	Desa Torongrejo	270	285	195	122	131	69
20	Desa Mojorejo	152	350	172	108	129	122
21	Desa Pendem	257	464	287	133	253	114
22	Desa Junrejo	137	159	146	122	138	71
23	Desa Tlekung	92	38	58	31	49	13
24	Desa Dadaprejo	120	121	44	31	57	21
	Jumlah	4.271	3.809	3.229	2.219	3.719	1.875

Sumber: SSK Kota Batu

Kondisi kesehatan masyarakat dapat menjadi parameter sejauh mana kondisi sanitasi yang ada di suatu daerah. Terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk antara lain diare dan penyakit kulit. Berikut merupakan tabel kondisi kesehatan masyarakat terkait dengan sanitasi selama 5 (lima) tahun terakhir yang ada di Desa Pandanrejo.

Tabel 4.3. Data kesehatan / data penderita penyakit yang berkaitan dengan kondisi sanitasi

NO	Dusun/ RW	Nama penyakit	Jumlah penderita (jiwa)/tahun kejadian				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Dusun Ngujung (RW 01,02,03)	Diare	17	16	15	14	11
		Kulit	15	13	11	9	8
2	Dusun Dadapan (RW 04,05)	Diare	22	20	19	17	15
		Kulit	15	12	11	8	7

3	Dusun Kajar (RW 06,07,08)	Diare	17	15	12	10	9
		Kulit	10	9	7	5	4
4	Dusun Pandan (RW 09,10,11)	Diare	20	19	17	15	13
		Kulit	12	11	10	7	8

Sumber: CSIAP (*Community Sanitation Action Plan*) Desa Pandanrejo 2103

Dari tabel di atas diketahui bahwa kondisi kesehatan Desa Pandanrejo terutama di Dusun Dadapan memerlukan penanganan khusus dibidang sanitasi karena gejala sakit diare yang muncul bisa jadi merupakan gejala dari kurangnya penanganan sanitasi yang kurang baik atau kurangnya wawasan masyarakat tentang cara hidup sehat sehingga mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Kita tahu bahwa diare ataupun penyakit kulit merupakan indikasi dari ketidak higienisan lingkungan. Oleh sebab itu di wilayah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan tindak lanjut dalam mengatasi gejala yang muncul yang diakibatkan oleh lingkungan yang kurang sehat. Salah satu tindakan yang mungkin dilakukan dalam menindaklanjuti masalah ini adalah dengan memberikan penyuluhan melalui kader masyarakat tentang bagaimana cara hidup yang sehat dan bagaimana menjaga lingkungan senantiasa bersih.

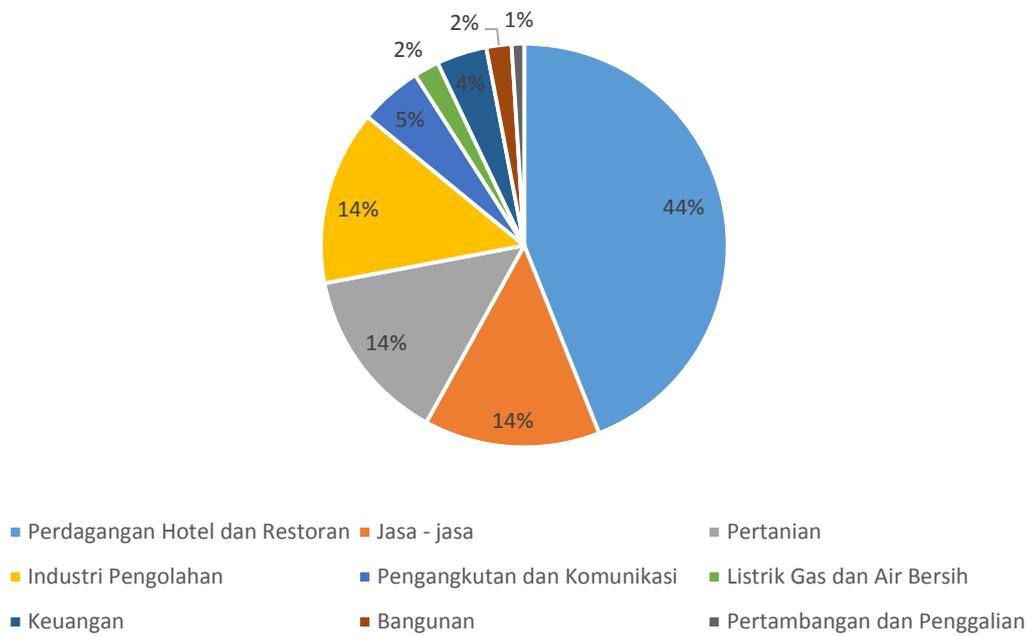
2) Kondisi Perekonomian Masyarakat

Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Keindahan alam dan berbagai tempat tujuan wisata di sekitar Batu memang menjadi komoditas ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Sekitar 24 objek wisata resmi, mulai dari bumi perkemahan

pemandian air dingin dan panas, agrowisata, hingga wisata dirgantara (paralayang) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap bulannya.

Gambar 4.4. Kegiatan Perekonomian Kota Batu

Distribusi Kegiatan Ekonomi Kota Batu



Sumber: Dinas Cipta Karya PU dan Bina Marga Kota Batu 2013

Kondisi perekonomian Desa Pandanrejo dapat dilihat dari tingkat produktifitas sumber daya alamnya sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 4.4. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Pandanrejo

No	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	779
2	Pedagang	54



3	Pegawai Negeri Sipil	13
4	Guru/Dosen	32
5	ABRI	3
6	Purnawirawan/Pensiunan	41
7	Buruh	300
8	Wiraswasta	45
9	Pegawai Swasta	445
10	Tukang	30
11	Sopir	17
12	Jasa	11
13	Lain - lain	23

Sumber: Arsip Profil Desa Pandanrejo, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian warga Desa Pandanrejo sangat beragam tetapi sebagian besar adalah pegawai swasta dan petani, ini disebabkan karena masih banyak lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan rata – rata kesejahteraan penduduk adalah menengah kebawah maka dari itu pemerintah desa giat melaksanakan program – program pemberdayaan masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perkonomian masyarakat dibidang ekonomi melalui peminjaman modal bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

3) Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Sanitas

Kondisi sanitasi Kota Batu yang dalam hal ini meliputi Sub-sektor persampahan, air limbah, dan drainase lingkungan serta aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), secara umum diuraikan seperti berikut ini.

a. Persampahan

Seperti halnya kota-kota di Indonesia, masalah persampahan adalah masalah yang harus mendapat perhatian dengan serius. Mengingat persampahan dapat menjadi salah satu sumber munculnya penyakit. Di Kota Batu tingkat pelayanan sampah belum optimal baru mencapai 60 %.

b. Air Limbah (grey water)

Masyarakat Kota Batu pada umumnya belum memberikan perhatian terhadap pembuangan air limbah rumah tangga. Hal ini masih nampak dari perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke saluran umum/drainase/sungai. Drainase lingkungan selain sebagai saluran air hujan, juga berfungsi sebagai saluran pembuangan air limbah rumah tangga yaitu sebesar 62 %.

c. Air Limbah (black water)

Masyarakat Kota Batu 84,2 % telah memiliki jamban lengkap dengan septic tank. Jika dilihat persentasenya relatif cukup besar, namun secara teknis belum diketahui secara pasti kelayakannya.

d. Drainase Lingkungan

Di beberapa tempat di wilayah Kota Batu, kondisi drainase lingkungan kurang memenuhi syarat teknis dan fungsi. Meskipun Kota Batu terletak di

perbukitan, pada saat musim hujan di beberapa ruas jalan masih terdapat luberan air karena drainase masih berfungsi sebagai saluran air hujan dan limbah rumah tangga. Persentasenya sebesar 62 %.

e. Aspek PHBS

Di Kota Batu pada saat ini angka penyakit berbasis lingkungan masih relatif tinggi khususnya diare. Perilaku masyarakat yang masih BAB di sungai dan parit sebesar 13,8 %. Selain itu, cuci tangan pakai sabun pada 3 waktu penting masih belum membudaya yaitu sebesar 21,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi masih memerlukan perhatian yang serius.

Kondisi sarana sanitasi Desa Pandanrejo di beberapa titik belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian warga tidak mempunyai sarana sanitasi yang memadai. Sarana sanitasi/MCK yang belum memenuhi standar kesehatan. Hal ini tampak dengan masih banyaknya warga yang menggunakan sungai sebagai keperluan mandi, BAB, maupun cuci, walaupun tidak dilakukan di sungai tapi hasil pembuangan limbah rumah tangga tersebut dialirkan langsung ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Selain itu sebagian warga Desa Pandanrejo masih menggunakan septictank yang kurang memenuhi standar dari segi konstruksi dan desain sehingga terdapat kemungkinan menimbulkan rembesan dan mencemari air tanah yang ada di lingkungannya, bahkan ada beberapa kasus terjadinya penggerusan tanah di septictank, tentu saja hal ini sangat membahayakan anggota keluarga yang menggunakan septictank tidak sesuai dengan standar kesehatan.

4) Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Masyarakat Kota Batu yang berada di bantaran sungai pada umumnya memiliki jamban, tetapi tidak dilengkapi dengan septictank dan resapan. Sehingga limbah langsung dialirkan ke sungai. Untuk masyarakat yang tinggal jauh daribantaran sungai sebagian besar sudah memiliki jamban dengan kondisi teknis yang sudah dilengkapi dengan fasilitas septictank dan resapan.

Secara umum di Kota Batu, limbah cair rumah tangga non kaku/grey water (limbah kamar mandi, limbah dapur yang mengandung makanan dan tempat cuci) belum mendapatkan penanganan yang semestinya. Limbah ini masih dibuang langsung ke selokan, parit dan badan sungai tanpa diolah sedikitpun.

Akibatnya ketika mengalami proses dekomposisi oleh bakteri pengurai, bau busuk tidak dapat dihindari. Udara menjadi tidak segar, terlebih pada musim kemarau. Hal ini kerap menjadi masalah di areal permukiman.

Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman - kuman penyebab penyakit disentri, typhus, kolera ISPA dan sebagainya. Air limbah tersebut seharusnya dibuatkan resapan yang memenuhi syarat teknis agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan

Pembuangan air limbah rumah tangga di Desa Pandanrejo juga belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Sebagian warga masih membuang limbah air rumah tangga langsung ke sungai, sehingga mencemari air sungai. Dan masih pula didapati warga yang membuang air limbahnya ke pekarangan tanpa ada pengolahan (*treatment*) terlebih dahulu. Tidak jarang juga sebagian besar

masyarakat mengalirkan air limbah rumah tangga dibuang ke persawahan. Padahal secara logika, limbah tersebut akan merusak tanaman itu sendiri. Hal ini bisa menimbulkan pencemaran baik terhadap air sumur maupun tanah.

5) Pengelolaan Persampahan

Penanganan sampah di Kota Batu dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Kebersihan dan masyarakat/warga. Daerah pelayanan meliputi seluruh wilayah administrasi kota, yaitu: Kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo.

Sistem manajemen pengelolaan persampahan dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Kebersihan. Untuk pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tangga menuju TPS dilakukan secara mandiri oleh warga. Untuk kawasan perdesaan umumnya memakai sistem penimbunan, dibakar dan dijadikan kompos.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan meliputi:

- Secara berkala mengadakan kerja bakti menangani sampah/kebersihan di lingkungannya.
- Penanganan sampah secara swadaya dari rumah ke TPS

Sistem penanganan pembuangan sampah rumah tangga sudah menunjukkan perbaikan, dan menuju pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini disebabkan karena Desa Pandanrejo memiliki Bangunan Depo Sampah yang merupakan kerja sama Pemerintah Desa Pandanrejo dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pandanrejo menyediakan tong- tong sampah melalui dana ADD tahun 2012. Dimana setiap rumah tangga disediakan 2 tong sampah untuk

memilah sampah basah dan sampah kering masing – masing rumah tangga. Permasalahan yang cukup klasik muncul dalam dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah di skala rumah tangga. Sampah organik dan anorganik disatukan dalam satu tong sampah sehingga petugas kebersihan melakukan pemilahan sampah ulang yang tentunya memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Waktu yang biasanya digunakan petugas kebersihan untuk mengambil sampah digunakan untuk memilah sampah, hal ini menyebabkan keterlambatan pengambilan sampah di rumah – rumah warga. Secara otomatis, sampah menjadi menumpuk di depan rumah warga. Penumpukan sampah tersebut akan menimbulkan permasalahan lain yaitu bau dan pemandangan yang kurang sedap dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan timbulnya masalah kesehatan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan meliputi:

- Secara berkala mengadakan kerja bakti menangani sampah/kebersihan lingkungan
- Penganganan sampah secara swadaya (iuran perbulan sebesar Rp. 5.000) dari rumah ke TPS
- Sosialisasi kader masyarakat tentang kesadaran pembuangan sampah

6) Pengelolaan Drainase Lingkungan

Secara umum drainase lingkungan di Kota Batu masih merupakan masalah yang harus diperhatikan dan ditangani secara serius. Di beberapa tempat/lokasi masih dijumpai adanya saluran drainase jalan yang tersumbat, ketidakmampuan menampung air hujan dan ketidakteraturan drainase lingkungan sebagai

pembuangan limbah rumah tangga. Saluran drainase lingkungan di Kota Batu masih berfungsi ganda, sebagai saluran air hujan dan saluran limbah rumah tangga.

Ada yang perlu di benahi dalam sistem penanganan drainase lingkungan.

Penanganan yang terencana, tepadu dan berkesinambungan sangat diperlukan.

7) Penyediaan Air Bersih

Jumlah pelanggan PDAM Kota Batu s/d Desember 2008 adalah 9.209 unit.

Sedangkan Cakupan pelayanan PDAM Kota Batu pada tahun 2008 adalah 27,60 %.

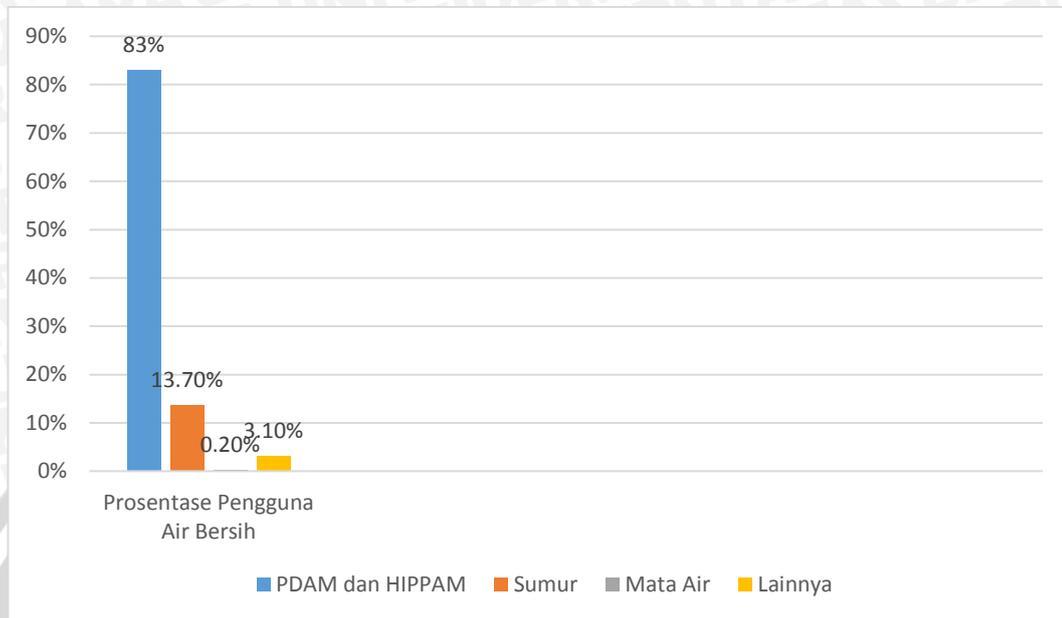
Kategori pelanggan PDAM Kota Batu beserta jumlah pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Data Pemasangan Meter s/d Desember 2008

No	Desa/Kelurahan	Pelanggan Aktif (Unit)
1	Kel. Ngaglik	1.579
2	Kel. Songgokerto	481
3	Kel. Sisir	3.069
4	Kel. Temas	935
5	Desa Oro – Oro Ombo	642
6	Desa Pesanggrahan	698
7	Desa Beji	191
8	Desa Mojorejo	450
9	Desa Torongrejo	14
10	Desa Pandanrejo	424
11	Desa Sidomulyo	111
12	Desa Sumberejo	613
13	Desa Tlekung	2
	TOTAL	9.209

Sumber: PDAM Kota Batu

Gambar 4.5. Prosentase Penyediaan Air Bersih Yang Digunakan



Sumber: PDAM Kota Batu

Untuk penyediaan air bersih yang dilakukan oleh HIPPAM, jumlah Desa / Kelurahan yang terlayani sebanyak 14 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah KK terlayani 7.062 KK (tahun 2007) sedangkan jumlah KK Potensi sebesar 10.725 KK.

Sebagian masyarakat Desa Pandanrejo menggunakan sumber air HIPPAM yang berasal dari 3 sumber mata air. Dusun Ngujung dari sumber mata air Cinde, Dusun Kajar dan Dusun Pandan dari sumber mata air Ngesong, dan Dusun Dadapan dari sumber mata air Rewog.

8) Pola Hidup Bersih dan Sehat

Secara umum kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) telah dilakukan sejak tahun 2002 oleh Dinas Kesehatan melalui sosialisasi di tiap – tiap Desa / Dusun akan tetapi perhatian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih dirasa kurang, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah dan

limbah lainnya disebarkan tempat. Tanpa adanya pengolahan yang baik lebih dahulu.

Untuk pembuangan sampah masih dijumpai banyaknya tempat pembuangan sampah liar atau dibuang di sungai. Dengan masih juga banyak dijumpai sampah yang menumpuk di depan rumah dengan ditaruh di dalam tas plastik. Padahal hal tersebut sebagai sarang penyakit karena sampah mengandung bau yang tidak sedap dan mengandung banyak lalat yang datang. dengan begitu secara tidak langsung sampah merupakan permasalahan yang harus segera ditangani.

Sedangkan untuk kebiasaan BABS masyarakat di sekitar bantaran sungai masih menggunakan sungai sebagai WC umum tanpa adanya dinding pelindung untuk menutupi aktivitas BABS. Sedangkan untuk pembuangan limbah BABS, langsung dialirkan ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sehingga kader masyarakat secara intensitas melakukan penyadaran PHBS secara terus menerus di sektor sanitasi serta dengan melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam mengefektifkan pola PHBS.

b. Implementasi pembangunan IPAL SPBM

1) Organisasi Pengelola Tingkat Masyarakat

Dengan melihat kondisi kelembagaan yang ada di Desa Pandanrejo, diketahui bahwa keterlibatan warga dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan sosial yang diikuti oleh warga masyarakat yang akan dikoordinasikan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada bersama kader – kader masyarakat yang ada.

Diantara organisasi kemasyarakatan tersebut, teridentifikasi adanya potensi tokoh – tokoh dan warga yang banyak berperan dalam setiap kegiatan. Keberadaan mereka juga merupakan aset di tingkat Desa, selain itu kepengurusan baik tingkat RW dan RT, maupun organisasi keagamaan yang ada membuktikan warga pedesaan akan dengan mudah mengorganisir dirinya sebagai sebuah kelompok yang siap dalam melaksanakan program dan pembangunan dalam kaitannya untuk peningkatan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Pandanrejo Abdul Manan, S.Sos dalam wawancara tanggal 15 Februari 2016 jam 09.00

“Masyarakat Desa Pandanrejo merupakan masyarakat yang dapat mengikuti perkembangan dan mendukung pembangunan terutama bagi desanya. Walaupun tergolong masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang, masyarakat Desa Pandanrejo aktif dalam mengikuti kegiatan sosial yang dikoordinasi oleh organisasi kemasyarakatan. Selain itu terdapat berbagai organisasi kelompok yang diikuti masyarakat dan di naungi oleh pemerintah misalnya Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia), BKM (Baan Keswadayaan Masyarakat), Pokjasa (Kelompok Kerja Sanitasi), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan lain sebagainya. ...”

Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “BHAkti SEJAHTERA”, difasilitasi oleh program pemerintah berupa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I tahap 2, yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara bersama, mandiri dan berkelanjutan, melalui suatu pendekatan kelembagaan masyarakat yang berbasis pada prinsip dan nilai – nilai serta penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat di kelurahan/desa sasaran yang memiliki kinerja baik.

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui fasilitasi persoalan – persoalan sanitasi yang ada dalam komunitas serta memecahkan masalah – masalah

sanitasi melalui penyediaan sarana sanitasi secara komunal berbasis masyarakat khususnya bagi kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin.

Misi BKM dalam SPBM adalah melibatkan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka mendukung upaya yaitu menurunkan sebesar separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar yaitu stop BABS dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah.

Tujuan BKM dalam program SPBM ini adalah:

- Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi PHBS masyarakat
- Meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan

Tersedianya sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Kriteria penentuan kabupaten/kota sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) adalah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota/SSK (*City Sanitation Strategy*) dan menyampaikan surat jaminan kesiapan keikutsertaan didalam program dan pernyataan dukungan terhadap pembangunan sanitasi masyarakat (*community-lead sanitation development*).

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen rencana pembangunan sanitasi jangka menengah tingkat kabupaten/kota yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi. SSK memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, zona dan sistem layanan sanitasi, isu - isu strategis pengelolaan sanitasi, strategi pembangunan sanitasi serta program jangka menengah dan tahunan.

Dokumen SSK digunakan sebagai acuan pembagian peran antar pelaku pembangunan sanitasi, sekaligus sebagai kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja. Keberadaan SSK menjadi gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah. Penyusunan SSK menggunakan prinsip kerja skala kota dan multisektor; dari oleh dan untuk Pokja sinkronisasi perencanaan bottom up dan top down; dan berdasarkan data empiris.

Kriteria kelurahan sasaran adalah :

1. Kelurahan yang pernah menjadi lokasi sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP).
2. Kelurahan yang telah menerima minimal satu kali siklus dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi.
3. Sesuai dengan urutan kemampuan BKM/LKM yaitu menuju berdaya, mandiri dan madani. Penilaian tersebut ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan.

- 2) Mekanisme pemilihan dan penetapan lokasi sasaran :
 - a. DPIU melakukan sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka peminatan kelurahan untuk menerima program SPBM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Kelurahan yang berminat menyampaikan Surat Pernyataan Minat yang ditandatangani oleh Lurah dan Koordinator BKM/LKM kepada DPIU.
 - c. DPIU melakukan verifikasi tentang pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan.
 - d. DPIU mengajukan usulan lokasi sasaran SPBM kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.

Tabel 4.6. Alokasi Program SPBM

No	Lokasi Sasaran	Keterangan
1	Provinsi	5 Provinsi (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara)
2	Kabupaten/Kota	34 Kabupaten yang terletak di 5 provinsi terpilih dan telah memiliki/menyiapkan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
3	Kelurahan	Total sebanyak 1.350 lokasi, yang sebelumnya menjadi lokasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

Sumber: Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat 2011

SSK telah memetakan kondisi sanitasi tiap – tiap Kelurahan/Desa di Kota Batu.

Adapun Kondisi Sanitasi Desa Pandanrejo dalam data Kondisi Sanitasi menurut SSK (Strategi Sanitasi Kota) Kota Batu pada Tabel data di bawah ini.

Tabel 4.7. Hasil Pemetaan Sanitasi Menurut Pokjasan dan SSK Kota Batu di Desa Pandanrejo

No	Data Lokasi			Data Hasil Pemetaan oleh Pokjasan					% bobot (kolom5)	% bobot (kolom6)	% bobot (kolom7)	% bobot (kolom8)	% bobot (kolom9)	Total % bobot	Rangking
	Dusun	RW terlayani	RT Terlayani	Jml KK Pemanfaat Total	Jml Pemanfaat KK Miskin	Kesiapan Masyarakat Berkontribusi	Ketersediaan Lahan (Perorangan Hibah/Negara)	Kelayakan Teknis							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dadapan	4 dan 5	1,2,4,5,6,7,8	80	28	14.025.000	Tanah Negara & ijin	Layak & ada Potensi	20	15	20	5	10	70	1
2	Pandan	10 dan 11	9,11,12,13,14,15	76	24	11.050.000	Tanah Negara & ijin	Layak & ada Potensi	20	5	20	5	10	60	2
3	Ngujung	2 dan 3	8,10,11,16	64	17	8.950.000	Tanah Negara & ijin	Layak & ada Potensi	15	5	15	5	10	50	3

Sumber: *Community Sanitation Action Plan / CSIAP Pandanrejo, 2013*

Keterangan:

1. Bobot Nilai Jumlah Pemanfaat KK Terkoneksi IPAL

Apabila jumlah pemanfaat : 75 – 100 KK

Bobot nilai 20%

Apabila jumlah pemanfaat : 61 – 74 KK

Bobot nilai 15%

Apabila jumlah pemanfaat : 50 – 60 KK

Bobot nilai 10%

Apabila jumlah pemanfaat : < 50 KK

Bobot nilai 0%

2. Bobot Nilai Jumlah Pemanfaat KK Miskin

Apabila jumlah pemafaat : 50 – 100 KK miskin	Bobot nilai 35%
Apabila jumlah pemafaat : 35 – 49 KK miskin	Bobot nilai 25%
Apabila jumlah pemafaat : 25 – 34 KK miskin	Bobot nilai 15%
Apabila jumlah pemafaat : < 25 KK miskin	Bobot nilai 0%

3. Bobot Nilai Kesiapan Masyarakat Berkontribusi

Apabila kontribusi masyarakat : > 10 juta Rupiah	Bobot nilai 20%
Apabila kontribusi masyarakat : 7,5 – 10 juta Rupiah	Bobot nilai 15%
Apabila kontribusi masyarakat : 5 – 7.49 juta Rupiah	Bobot nilai 10%
Apabila kontribusi masyarakat : < 5 juta Rupiah	Bobot nilai 5%

4. Bobot Nilai Ketersediaan Lahan

Apabila milik perseorangan & dihibahkan	Bobot nilai 15%
Apabila milik Negara/Daerah & ada ijin	Bobot nilai 5%

5. Bobot Nilai Kelayakan Teknis

Apabila layak lokasi (Elevasi, saluran pipa, dekat badan sungai, mobil tinja), dan ADA potensi pengembangan usaha	Bobot nilai 10%
Apabila layak lokasi (Elevasi, saluran pipa, dekat badan sungai, mobil tinja), dan TIDAK ADA potensi pengembangan usaha	Bobot nilai 5%

3) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Program

Tahapan kegiatan pelaksanaan program di tingkat kelurahan/desa dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Tahapan pelaksanaan untuk kelurahan/desa yang baru mendapatkan program SPBM di tahun 2013
- b. Tahapan pelaksanaan untuk kelurahan/desa yang sudah pernah mendapatkan program SPBM di tahun sebelumnya

Perbedaan tahapan antara kelurahan/desa lama dan baru terletak pada tahap persiapan warga khususnya pada Rembug Kelurahan I, dan tahap perencanaan pada kegiatan *Review* PJM Pronangkis. Secara lengkap perbedaan tahapan pelaksanaan program di tingkat masyarakat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8. Perbedaan Tahapan Pelaksanaan Program di Tingkat Masyarakat

No	Kelurahan Baru	Kelurahan Lama
1	<p>Tahap Persiapan Masyarakat</p> <p>f. Pemicuan</p> <p>g. Sosialisasi program;</p> <p>h. Rembug khusus perempuan I</p> <p>i. Pelaksanaan Rembug Warga Kelurahan I, untuk membentuk Pokjasan Kelurahan; Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk menerima dan melaksanakan program sesuai dengan ketentuan/pedoman; serta penyusunan jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan.</p>	<p>Tahap Persiapan Masyarakat</p> <p>a. Pemicuan.</p> <p>b. Sosialisasi program;</p> <p>c. Rembug khusus perempuan I</p> <p>d. Pelaksanaan Rembug Warga Kelurahan I, untuk Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk menerima dan melaksanakan program sesuai dengan ketentuan/ pedoman; serta penyusunan jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan.</p>
2	<p>Tahap Perencanaan Kegiatan</p> <p>a. Pemicuan</p> <p>b. Review PJM Pronangkis</p> <p>c. Pemetaan Sanitasi Tingkat Kelurahan</p> <p>d. Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi / Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP)</p>	<p>Tahap Perencanaan Kegiatan</p> <p>a. Pemicuan</p> <p>b. Rembug Kelurahan II</p> <p>c. Rembug RT/RW I</p> <p>d. Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi di RT/RW terpilih</p> <p>e. Rembug Khusus Perempuan II</p>

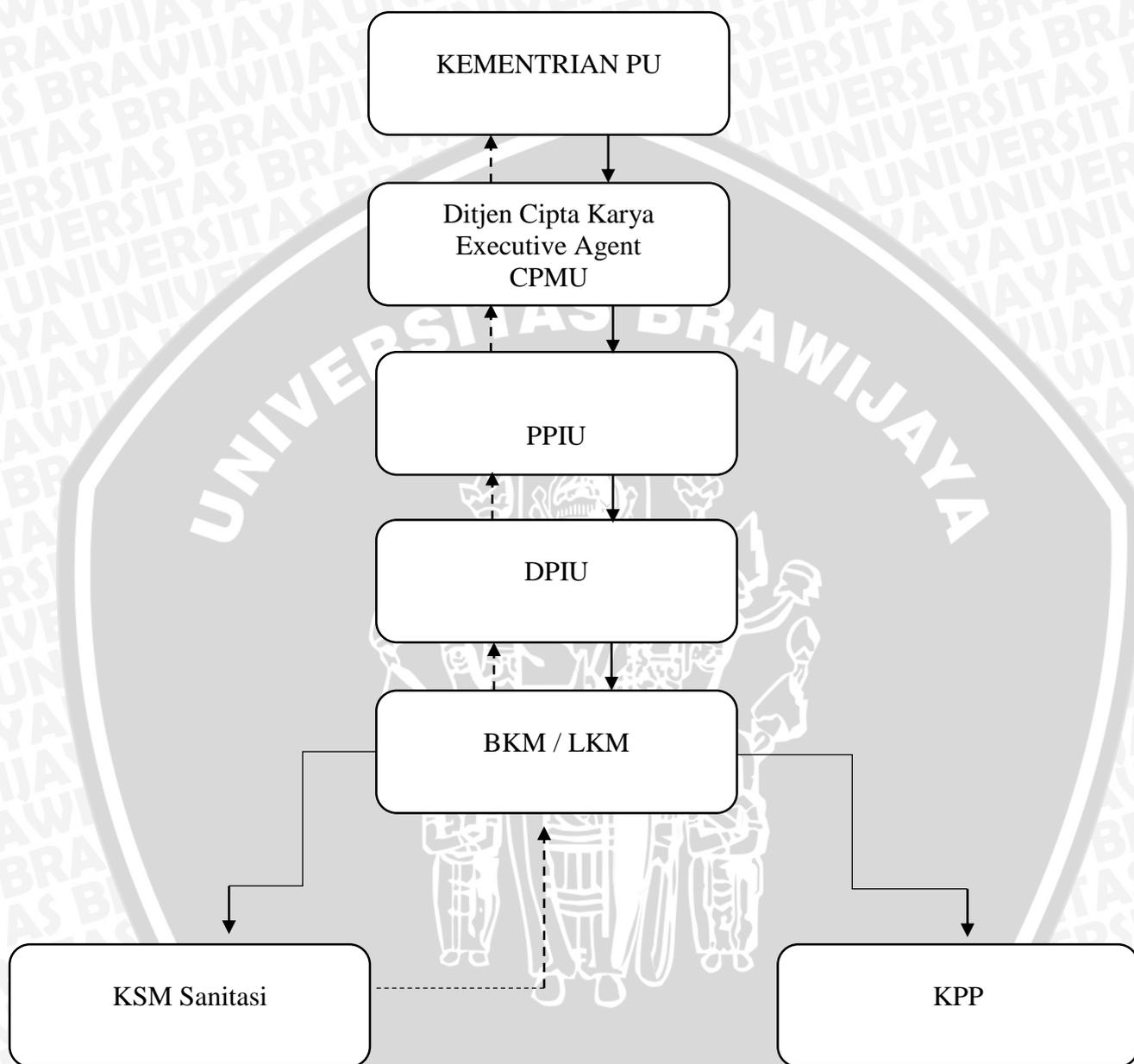
<ul style="list-style-type: none"> e. Rembug KelurahanII (Seleksi lingkungan dan Penetapan CSIAP) f. Rembug RT/RW I g. Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi di RT/RW terpilih h. Rembug Khusus Perempuan II i. Rembug RT/RW II j. Pembentukan KSM Sanitasi k. Penyusunan RKM l. Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan (O&P) m. Verifikasi RKM dan audit gender n. Penyusunan dokumen pencairan dana 	<ul style="list-style-type: none"> f. Rembug RT/RW II g. Pembentukan KSM Sanitasi h. Penyusunan RKM i. Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan (O&P) j. Verifikasi RKM dan audit gender k. Penyusunan dokumen pencairan dana
<p>3 Tahap Pelaksanaan Kontstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemicuan b. Rembug warga RT/RW III c. Penandatanganan kontrak kerja d. Pelaksanaan Kegiatan Fisik e. Rembug warga (tahap I setelah pencairan 40% pertama, tahap II setelah pencairan 30% kedua, tahap III setelah pencairan 30% ketiga) f. Pembentukan KPP (Rembug warga) 	<p>Tahap Pelaksanaan Kontstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemicuan b. Penandatanganan kontrak kerja c. Rembug warga RT/RW III d. Pembentukan KPP (Rembug warga) e. Pelaksanaan Kegiatan Fisik f. Rembug warga (tahap I setelah pencairan 40% pertama, tahap II setelah pencairan 30% kedua, tahap III setelah pencairan 30% ketiga) g. Pengawasan Kegiatan

	g. Pengawasan Kegiatan Pelaporan Kegiatan Rembug Pelaksanaan Mingguan	h. Pelaporan Kegiatan Rembug Pelaksanaan Mingguan
4	Tahap Operasi dan Pemeliharaan a. Pemicuan b. Rembug Warga RT/RWIV c. Serah Terima Sarana Sanitasi Operasi dan Pemeliharaan	Tahap Operasi dan Pemeliharaan a. Pemicuan b. Rembug Warga RT/RWIV c. Serah Terima Sarana Sanitasi Operasi dan Pemeliharaan

Sumber: Sumber: Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat 2011

Tahapan pelaksanaan Program SPBM ini dilakukan dari tingkatan tertinggi hingga menuju masyarakat langsung (top down). Sedangkan evaluasi program ini dilakukan mulai dari tingkatan masyarakat hingga pemerintahan tertinggi (bottom up). Kementerian PU memberikan mandat pada Ditjen Cipta Karya (CPMU), setelah itu CPMU membentuk PPIU ditingkatan Provinsi, dan PPIU membentuk DPIU di tingkatan daerah atau Kota. DPIU menyebar ke Kelurahan/Desa yang telah dipetakan kondisi sanitasinya oleh Pokjasa untuk menerima program SPBM dan di bentuklah BKM. BKM bertugas mengawasi satu Kelurahan/Desa yang menerima program SPBM. Kemudian BKM membentuk KSM yang bertugas melaksanakan pembangunan Fisik IPAL. Dan setelah KSM menyelesaikan pembangunan IPAL maka BKM membubarkan BKM dan me bentuk KPP untuk melaksanakan pengelolaan dan perawatan IPAL guna keberlanjutan program SPBM.

Gambar 4.6. Bagan Pelaksanaan IPAL SPBM



Keterangan :

Garis Pengendalian : —————>

Garis Pelaporan : - - - - ->

Sumber: Community Sanitation Action Plan Desa Pandanrejo 2013

c. Evaluasi pembangunan IPAL SPBM

Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan Program SPBM sesuai dengan prinsip, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengendalian program bertujuan untuk:

- Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan
- Menjamin bahwa perencanaan dirumuskan melalui proses dan mekanisme yang benar
- Menjamin terlaksananya Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (K3L) disetiap tahapan
- Menjamin jenis dan lokasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
- Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan perencanaan dan dikelola secara transparan
- Menjamin agar kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan
- Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing
- Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengendalian Program SPBM dilakukan melalui pengawasan/pemantauan, pelaporan serta evaluasi, dengan strategi sebagai berikut:

- Pengawasan/pemantauan secara ketat dan obyektif pada setiap proses tahapan kegiatan di setiap level pelaku
- Pelaporan di semua tingkatan pelaku dilaksanakan secara disiplin, akurat dan tepat waktu
- Pelaksanaan evaluasi secara regular didukung dengan pemberian sanksi untuk penegakan aturan

1) Pemantauan

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam program ini, pemantauan akan terdiri dari:

- Pemantauan Internal, dilakukan oleh seluruh unit pelaksana program pelaku di dalam system (Aparat Pemerintah/Struktural, Konsultan/Fungsional, serta masyarakat kelurahan sasaran)
- Pemantauan Eksternal, dilakukan oleh pelaku di luar unit pelaksana kegiatan (LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Media Massa, dll). Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melalui pemantauan (monitoring) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku Program SPBM;

2) Pelaporan

Pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut pemantauan yang telah dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Laporan ditulis secara sederhana, ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan.

3) Evaluasi Program

Evaluasi Program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala, solusi dan alternatif tindakan penyelesaian yang dilakukan selama pelaksanaan program.

Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja program secara keseluruhan, dengan berbasis pada hasil penilaian indikator kinerja yang ditetapkan

Indikator Kinerja Program Indikator utama Program SPBM terdiri dari indikator output dan outcome, sebagai berikut:

a. Output:

- Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akses pelayanan prasarana/sarana sanitasi dasar, terutama kaum perempuan, kelompok rentan/marginal dan penduduk miskin.
- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki kesadaran akan kebersihan dan sanitasi serta mampu mengelola limbahnya dengan benar.
- Terbentuknya organisasi masyarakat pengelola dan pemanfaat serta bertanggung jawab atas kelestarian infrastruktur terbangun, yang memiliki rencana operasional dan pemeliharaan.

b. Outcome:

- Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi).

- Menurunnya kejadian penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku hidup yang kurang sehat.

B. Faktor penghambat Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata

Masyarakat Desa Pandanrejo tergolong tipikal masyarakat pedesaan, hal ini tergambar dari struktur masyarakat yang bersifat paguyuban dimana tingkat kepedulian dan kebersamaan yang tinggi terhadap sesama warga dan sumbangsih peran yang sesuai dengan kemampuan masing – masing merupakan bentuk tanggung jawab warga untuk menjunjung tinggi transparansi maupun legalitas yang proporsional dalam setiap peran kemasyarakatannya.

Potensi dan kontribusi masyarakat terhadap sistem pengambilan keputusan dan pola pembangunan masyarakat secara partisipatif Desa Pandanrejo masih didominasi oleh Kepala Desa, tokoh – tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan rapat – rapat pengambilan keputusan ditingkat Desa Pandanrejo. Hal ini dipertegas oleh Ira Yuni Selaku Ketua BKM Bhakti Sejahtera Desa Pandanrejo, pada tanggal 25 Februari 2016, jam 08.30

“Masyarakat Desa Pandanrejo sangat antusias dalam menerima program BKM. Karena pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Karena seperti tipikal masyarakat Desa pada umumnya yang bersifat paguyuban dan gotong royong. Apalagi program ini dilaksanakan untuk pengembangan Desa mereka. Bahkan pada pelaksanaan pemasangan besi dan pengecoran yang seharusnya dilakukan oleh RT penerima sarana IPAL dibantu oleh warga hampir satu dusun yang kurang lebih ada 200-an orang. . .”

Dengan struktur masyarakat Desa yang masih paguyuban dimana tingkat kepedulian dan kebersamaan masih sangat tinggi diharapkan pelaksanaan dapat

berjalan lancar, karena mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Namun pada fakta yang terdapat di lapangan muncul beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan IPAL SPBM. Dengan beberapa isu – isu permasalahan dan data serta fakta yang ada di lapangan ada beberapa penghambat dalam pembangunan IPAL pada program SPBM ini sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa Yang Kurang

Sumber Daya Manusia masyarakat Desa yang kurang menjadi salah satu penghambat dari strategi pembangunan IPAL SPBM ini. Karena kebanyakan masyarakat pedesaan mengesampingkan pendidikan. Penolakan pembangunan IPAL yang telah dipetakan oleh Pokjasa dan SSK oleh beberapa masyarakat yang bertempat tinggal 100m dari lokasi pembangunan. Sehingga pokjasa dan SSK harus memetakan kembali melakukan observasi dan eksplorasi lokasi sehingga memakan waktu duakali lipat. Hal ini dibenarkan oleh Ir. Moh, Dakkir, MM selaku Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu, pada wawancara tanggal 25 Februari 2016:

“Ada beberapa penghambat Program SPBM dalam pembangunan IPAL ini, salah satunya masyarakat desa itu sendiri. Mereka menolak pembangunan IPAL yang sudah dipetakan oleh SSK dengan alasan takut bau, takut tanaman mereka tercemar, takut merembes dan mencampuri sumur mereka. Padahal SSK sudah melakukan Observasi dan eksplorasi mendalam mengenai IPAL ini mulai dari konstruksi fisik hingga sistem pengolahannya sehingga dapat dijamin sangat minim terjadi hal yang ditakutkan masyarakat. Selain itu selalu

ada pelaporan dari KPP yang bertugas melakukan perawatan, pengoperasian, dan pengontrolan secara berkala.”

Keberlanjutan dari Program SPBM bergantung pada peran aktif masyarakat pengguna IPAL dan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara). KPP mengenakan iuran bagi setiap KK pengguna fasilitas IPAL untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan. Namun karena iuran IPAL yang dibebankan pada masyarakat pengguna fasilitas IPAL berakibat pada perpipaian sering kurang terpelihara. Hal ini dibenarkan oleh Ayunda Puspita, SE selaku staf Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu, pada wawancara tanggal 1 Maret 2016, jam 3.58 :

“keberlanjutan dari program SPBM ini seperti pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan itu ada iurannya yang dibebankan pada masyarakat pengguna fasilitas IPAL tapi kecil sekali sehingga pemeliharaan dan pengelolaan sering diabaikan soalnya kan ada pelaporan berkala dari KPP itu sering telat bahkan ada lokasi yang sama sekali belum setor laporan.”

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sanitasi

Secara umum kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) telah dilakukan sejak tahun 2002 oleh Dinas Kesehatan melalui sosialisasi di tiap – tiap Desa / Dusun akan tetapi perhatian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih dirasa kurang, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah dan limbah lainnya disembarang tempat. Tanpa adanya pengolahan yang baik lebih dahulu.

Untuk pembuangan sampah masih dijumpai banyaknya tempat pembuangan sampah liar atau dibuang di sungai. Dengan masih juga banyak dijumpai sampah yang menumpuk di depan rumah dengan ditaruh di dalam tas plastik. Padahal hal tersebut sebagai sarang penyakit karena sampah mengandung bau yang tidak sedap

dan mengandung banyak lalat yang datang. dengan begitu secara tidak langsung sampah merupakan permasalahan yang harus segera ditangani.

Sedangkan untuk kebiasaan BABS masyarakat di sekitar bantaran sungai masih menggunakan sungai sebagai WC umum tanpa adanya dinding pelindung untuk menutupi aktivitas BABS. Sedangkan untuk pembuangan limbah BABS, langsung dialirkan ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sehingga kader masyarakat secara intensitas melakukan penyadaran PHBS secara terus menerus di sektor sanitasi serta dengan melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam mengefektifkan pola PHBS.

c. Kurangnya Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Namun bukan berarti tanggung jawab dilimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pemerintah juga memiliki peran yang fundamental demi kelangsungan berjalannya program ini dengan optimal. Pemerintah berperan sebagai kontrol baik dari sisi teknis dan manajemen pengorganisasian. Namun sering terjadi ketidak sinergian antara pemerintah dan masyarakat. Dari segi teknis yang ditemukan dilapangan antara lain, akibat kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga lokasi pembangunan IPAL dialihkan secara mendadak sehingga mengurangi efektifitas waktu pengerjaan. Dari segi manajemen antara lain, kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat untuk PHBS sehingga

kontribusi masyarakat yang telah dipetakan pokjasa dan SSK dalam pelaksanaan program SPBM sangat kurang. Pada pengerjaan teknis konstruksi IPAL juga terdapat masalah karena tim pengawas teknis konstruksi yang ditugaskan kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat sehingga banyak terjadi kesalahan dalam melaksanakan teknis baik dalam pengerjaan ataupun pembelian bahan. Hal ini di tegaskan oleh Bapak Eko Sugianto selaku Ketua RT 14 sekaligus Ketua KPP “Lancar Jaya” Dusun Pandan, pada wawancara tanggal 15 Januari 2016 jam 13.30.

“Pengawas teknis konstruksi pembangunan IPAL kurang komunikasi dan koordinasi, mereka hanya memberikan sedikit arahan teknis yang telah diberikan di RKM. Ya jadi kita ya lihat apa yang ada di RKM dan jika bahan bangunan yang ada tidak sesuai dengan RKM ya kita harus hubungi mereka (Tim Pengawas Teknis Konstruksi) dulu, jadi sedikit menghambat proses pengerjaan. Kalo kita ganti tidak sesuai RKM takut kena sanksi. . .”

d. Kurangnya Sinergi Antar Pemerintah

Untuk kesinambungan prasarana dan sarana sanitasi perlu dibentuk organisasi operasi dan pemeliharaan (O & P). Kegiatan O & P ini bertujuan untuk keberlanjutan pelayanan dan pelestarian asset yang telah dibangun oleh masyarakat. Dalam program SPBM prasarana dan sarana yang dibangun adalah IPAL Komunal dengan sistem perpipaan dan kombinasi MCK dengan perpipaan. Untuk itu perlu dibentuk organisasi kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) yang nantinya akan melakukan operasi dan pemeliharaan. Salah satu Tugas KPP adalah memberikan pelaporan pada DPIU / pemerintah kondisi IPAL yang nantinya ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan pengambilan sampel hasil pengolahan air limbah untuk pengecekan BOD dan COD. Sedangkan pengecekan dilakukan oleh Jasa Tirta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kantor Lingkungan Hidup. Namun

karena biaya yang minimal untuk melakukan pengecekan dengan biaya yang mahal pengecekan BOD dan COD sering diabaikan sehingga masyarakat pengguna IPAL hanya memakai fasilitas IPAL tanpa mengetahui hasil pengolahan air limbah tersebut masih layak atau tidak atau bahkan berbahaya bagi ekosistem sekitar.

C. Analisis Data

1. Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata.

Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to the PNPM Mandiri* yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap penyiapan warga, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Program SPBM ini dilaksanakan dalam rangka mendukung salah satu upaya pencapaian target MDG's pada 2015, yaitu menurunkan sebesar 50% dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar serta sasaran RPJM 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan

(BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah. Secara bertahap dilaksanakan di 1.350 lokasi sasaran yang berada di 34 Kabupaten / Kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut telah menerima dana BLM minimal sebanyak satu kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.

Program SPBM memiliki visi berkurangnya angka kemiskinan melalui peningkatan akses sarana sanitasi di lokasi sasaran. Sedangkan misi program SPBM ini antara lain:

- Mewujudkan masyarakat yang sadar sanitasi untuk hidup bersih dan sehat.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak dan berkualitas.

Dalam upaya pelaksanaan program SPBM dengan capaian keberlanjutan, maka pelaksanaan SPBM mengacu pada Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

- Memobilisasi TFL untuk mendampingi masyarakat untuk melaksanakan pemetaan kemiskinan (sanitasi, identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, mengevaluasi kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif).
- Membentuk KSM, menyusun rencana pembangunan dan rencana investasi yang akan didanai dari BLM, menyiapkan DED, melaksanakan pekerjaan fisik, merumuskan dan melaksanakan rencana kegiatan O&P.

Penyediaan BLM untuk Pembangunan sarana sanitasi yang berkelanjutan:

- Pembangunan IPAL Komunal dengan sistem perpipaan
- IPAL Komunal dengan sistem perpipaan dan kombinasi MCK dengan perpipaan.

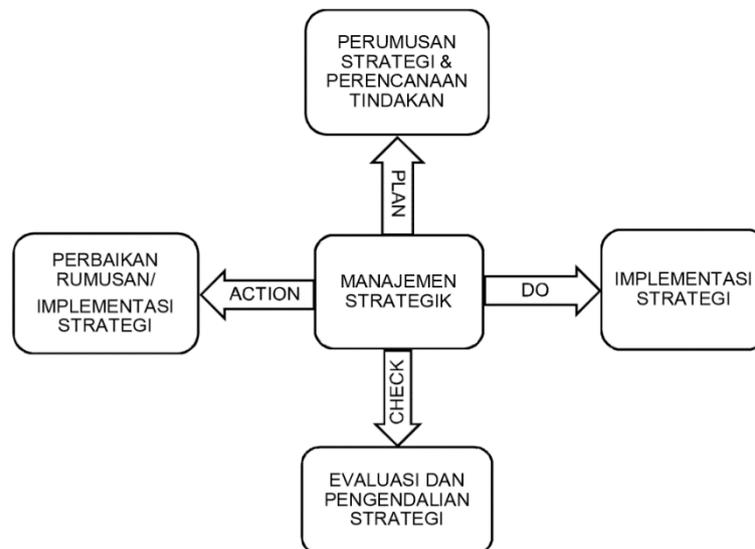
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, pelaksanaan program perlu didukung dengan kebijakan pelaksanaan sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkembangkan keswadayaan masyarakat secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif dan mendorong terciptanya kemitraan berbagai pihak dalam mendorong tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia di perkotaan untuk mengembangkan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.
- Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan potensial perkotaan untuk pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan keberlanjutan program.

Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah seni dan ilmu untuk “formulasi, implementasi dan evaluasi” keputusan - keputusan yang bersifat lintas fungsional, yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran keuangan, produksi, dan lain - lain agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Keputusan - keputusan yang bersifat lintas fungsional inilah yang dapat ditafsirkan sebagai strategi.

Gambar 4.7. Manajemen Strategik PDCA



Manajemen strategik juga dapat dipandang sebagai proses untuk mengelola strategi agar rumusan strategi dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti kegiatan manajemen yang lain, kegiatan mengelola strategi perlu kegiatan PDCA (*Planning-Doing-Controlling-Actuating*), sehingga keseluruhan kegiatan manajemen strategi menjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar, manajemen strategik PDCA, yaitu terdiri dari kegiatan Perumusan Strategi, Pelaksanaan atau Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian Strategi serta Tindakan Perbaikan terhadap Rumusan dan Implementasi Strategi. Dengan manajemen strategi tersebut diharapkan strategi benar - benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi. Dengan demikian manajemen strategik dapat didefinisikan, manajemen strategik adalah proses mengelola strategi yang terdiri dari tahapan perumusan- implementasi-evaluasi/pengendalian-perbaikan strategi, dengan tujuan agar strategi dapat diimplementasikan sehingga mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi. Dengan mengacu pada manajemen strategik PDCA maka terdapat tiga manajemen strategi untuk mengoptimalkan pembangunan IPAL SPBM dalam menunjang kawasan Desa Wisata yaitu, Perencanaan Pembangunan IPAL SPBM; Implementasi Pembangunan IPAL SPBM; dan Evaluasi Pembangunan IPAL SPBM.

a. Perencanaan pembangunan IPAL SPBM

Pada perencanaan pembangunan IPAL SPBM pelaksanaannya dilakukan di tingkat Kelurahan/Desa. Dalam perencanaan pembangunan IPAL SPBM ini tiap – tiap lembaga harus saling bersinergi antar satu dengan lain. Pada tahap perencanaan pembangunan IPAL SPBM ini BKM memiliki peran yang cukup penting. BKM bertugas melakukan *review* PJM Pronangkis (Pembangunan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan). Tujuannya adalah untuk menajamkan rencana kegiatan penanganan permasalahan sanitasi yang akan dilaksanakan masyarakat nantinya berupa bangunan IPAL. Kemudian BKM melakukan pemetaan sanitasi Kelurahan/Desa antara lain pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi pelayanan sanitasi kelurahan, kondisi kependudukan, sampai dengan permasalahan sanitasi yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana aksi perbaikan sanitasi (*Community Sanitation Implementation Action Plan/ CSIAP*) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Setelah dilakukan pemetaan sanitasi Kelurahan/Desa, BKM bertugas mengidentifikasi permasalahan dan memetakan kondisi sanitasi Kelurahan/Desa. Kemudian hasil dari identifikasi permasalahan dicermati bersama Pokjasan untuk memetakan kondisi sanitasi Kelurahan/Desa, serta menyusun rencana aksi perbaikan sanitasi atau *Community Sanitation Implementation Action Plan/ CSIAP*. CSIAP merupakan perencanaan partisipatif jangka menengah, dengan jangka waktu 3 tahun, mengenai rencana investasi pembangunan sarana sanitasi komunal, upaya peningkatan kualitas hygiene dan perilaku hidup bersih dan sehat tingkat

kelurahan dari hasil pemetaan sanitasi serta usulan kegiatan pembangunan skala kecil yang diusulkan oleh kelompok masyarakat.

Setelah BKM menyusun rencana aksi perbaikan sanitasi atau *Community Sanitation Action Plan/CSIAP*, BKM bersama Pemerintahan Kelurahan/Desa berembung untuk membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM bertugas sebagai koordinator utama dan penanggung jawab pelaksanaan fisik/konstruksi serta menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat). KSM beranggotakan masyarakat Kelurahan/Desa pengguna fasilitas IPAL. Setelah KSM dibentuk maka disusunlah RKM (Rencana Kerja Masyarakat).

RKM (Rencana Kerja Masyarakat) merupakan dokumen resmi perencanaan perbaikan sanitasi oleh masyarakat, yang akan digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana pembangunan prasarana-sarana sanitasi komunal. Dokumen RKM ini berisi mengenai Teknologi Sarana Sanitasi Terseleksi, Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Mekanisme dan Jadwal Pencairan Kontribusi, Konstruksi dan Supervisi, Capacity Building, Pengoperasian dan Pemeliharaan (O&P), Struktur organisasi KSM SPBM, serta Penjaminan Sistem. Akhir dari tahap perencanaan ini adalah finalisasi dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang harus diverifikasi oleh DPIU setelah dilakukan revisi.

Desa Pandanrejo merupakan salah satu Desa terpilih untuk menerima program SPBM dengan bentuk pembangunan fisik sarana IPAL dari pemerintah. Sesuai dengan penyajian data diatas bahwa menurut SSK (Strategi Sanitasi Kota) Desa Pandanrejo masuk dalam kriteria Desa yang memerlukan perhatian kondisi sanitasinya. Dengan pemanfaat terbanyak Dusun Dadapan yaitu 80 Kepala

Keluarga; Dusun Pandan 76 Kepala Keluarga; dan Dusun Ngujung 64 Kepala Keluarga. Sehingga Pemerintah Kota / DPIU membentuk BKM di Desa Pandanrejo guna melaksanakan program SPBM dengan bentuk pembangunan fisik sarana IPAL.

BKM Bhakti Sejahtera Desa Pandanrejo merupakan BKM di Desa Pandanrejo yang dibentuk pemerintah secara sah dan kepengurusan dan AD/ART telah dilegalkan oleh Notaris. BKM Bhakti Sejahtera di Desa Pandanrejo telah melaksanakan setiap proses dalam tahap perencanaan pembangunan IPAL SPBM. Mulai dari Review PJM Pronangkis, Pemetaan sanitasi Kelurahan/Desa dan penyusunan CSIAP serta pembentukan KSM pada tiap lokasi penerima sarana IPAL SPBM. Sedangkan sebagai koordinator utama dan penanggung jawab pelaksanaan fisik/konstruksi serta penyusunan RKM dilaksanakan oleh KSM pada tiap – tiap lokasi penerima sarana IPAL SPBM. Sesuai data yang telah disajikan diatas ditemukan adanya kendala permasalahan di tahap perencanaan pembangunan IPAL SPBM. Dari wawancara penulis pada Ir. Moh, Dakkir, MM selaku Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu:

“Ada beberapa penghambat Program SPBM dalam pembangunan IPAL ini, salah satunya masyarakat desa itu sendiri. Mereka menolak pembangunan IPAL yang sudah dipetakan oleh SSK dengan alasan takut bau, takut tanaman mereka tercemar, takut merembes dan mencampuri sumur mereka. Padahal SSK sudah melakukan Observasi dan eksplorasi mendalam mengenai IPAL ini mulai dari konstruksi fisik hingga sistem pengolahannya sehingga dapat dijamin sangat minim terjadi hal yang ditakutkan masyarakat...”

Masyarakat Desa sekitar bangunan IPAL SPBM keberatan pembangunan dilaksanakan di dekat rumah mereka. Masyarakat khawatir akan dampak yang

nantinya akan ditimbulkan dengan adanya pembangunan IPAL SPBM yang dilaksanakan di dekat rumah mereka. Masyarakat sekitar bangunan IPAL SPBM beranggapan jika nantinya akan menimbulkan bau tidak sedap disekitar rumah mereka, buangan hasil IPAL merusak tanaman dan mencemari air sekitar, bahkan mereka juga takut jika merembes dan mencampuri air sumur. Hal ini mengakibatkan BKM bersama Pokjasan dan SSK melakukan pemetaan sanitasi Kelurahan/Desa ulang, sehingga efektifitas waktu pada tahap perencanaan pembangunan IPAL SPBM berkurang karena dalam melakukan pemetaan sanitasi memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan adanya masalah di tahap perencanaan pembangunan IPAL SPBM strategi pembangunan IPAL SPBM guna menunjang kawasan Desa Wisata tidak bisa berjalan optimal.

b. Implementasi Pembangunan IPAL SPBM

Pada implementasi pembangunan IPAL SPBM pelaksanaannya dilakukan di tiap – tiap lokasi Kelurahan/Desa penerima sarana IPAL SPBM. Dalam implementasi pembangunan IPAL SPBM ini tiap – tiap lembaga harus saling bersinergi antar satu dengan lain yaitu pemerintah di tingkat Daerah/Kota (DPIU), pemerintah di tingkat Kelurahan/Desa (BKM), dan ditingkat masyarakat (KSM). Pada tahap perencanaan pembangunan IPAL SPBM ini KSM memiliki peran yang cukup penting. KSM memiliki tugas utama sebagai koordinator utama dan penanggungjawab pelaksanaan Fisik/konstruksi serta menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat). Dimana di dalamnya terdapat penandatanganan kontrak kerja oleh BKM selaku penanggung jawab KSM dan PPK Sanitasi Kota selaku wakil dari DPIU/Pemerintah Daerah/Kota. Tanda tangan kontrak kerja berupa Surat

Perjanjian Pelaksanaan Perkerjaan (SP3), yang di dalamnya berisi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal akhir kontrak), syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak serta tata cara pembayaran/pencairan dana. Selanjutnya di lakukan rembuk warga tingkat RT/RW untuk menghasilkan Rencana Pelaksanaan Pembangunan Infrastrukturnya yang bertujuan untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), serta finalisasi rencana Operasi dan Pemeliharaan. Dan proses terakhir implementasi pembangunan IPAL SPBM ini adalah pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi yang dilaksanakan oleh KSM dengan pengawasan BKM. Proses Pelaksanaan Pembangunan Sarana sanitasi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti Perencanaan Pekerjaan, Penyiapan Lokasi, Pengadaan Material dan Barang, Pelaksanaan Konstruksi, Sewa Alat, dan Jumlah Tenaga Kerja, Jadwal Waktu Pelaksanaan serta Pengendalian Pengeluaran Dana oleh Pelaksana.

Desa Pandanrejo memiliki 3 lokasi penerima program SPBM dengan bentuk pembangunan fisik sarana IPAL dari pemerintah yaitu, di Dusun Dadapan, di Dusun Ngujung dan di Dusun Pandan. Dalam tahap implementasi pembangunan IPAL SPBM peran KSM dan BKM memiliki peranan yang penting dan diharapkan ada sinergi antar lembaga tersebut. Dari penyajian data implementasi pembangunan IPAL SPBM yang dilaksanakan di Desa Pandanrejo terdapat beberapa masalah dalam pengerjaan teknis konstruksi IPAL. Hal ini dikarenakan SDM masyarakat desa yang kurang sering kali terjadi kesalahan dalam melaksanakan pengerjaan teknis. Selain itu pengawas teknis bagian konstruksi kurang melakukan komunikasi

dan koordinasi yang baik pada masyarakat sehingga pada proses pengerjaan memakan waktu yang agak lama. Dengan adanya masalah di tahap implementasi pembangunan IPAL SPBM strategi pembangunan IPAL SPBM guna menunjang kawasan Desa Wisata tidak bisa berjalan optimal.

c. **Evaluasi Pembangunan IPAL SPBM**

Pada tahap terakhir yaitu evaluasi pembangunan IPAL SPBM, BKM yang selama tahap pelaksanaan mendampingi KSM melakukan Rembug yang dihadiri perwakilan dari setiap lapisan pemerintahan mulai dari KSM, BKM, Lurah/Kades, PPK Sanitasi, dan DPIU ditingkat pemerintahan Kota. BKM menjelaskan secara rinci dan transparan laporan pertanggungjawaban. Materinya antara lain Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai dengan foto-foto pelaksanaan. Hasil Rembug Warga ini disampaikan kepada PPK Sanitasi Kabupaten/Kota. Isi dari laporan yang dipaparkan BKM antara lain, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K); Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). Selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan sarana IPAL yang dilakukan oleh Koordinator BKM dan PPK Sanitasi Kabupaten/Kota. Serah terima ini dilakukan setelah selesainya kegiatan konstruksi dan Operasionalisasi Sarana sanitasi yang dibangun sudah sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat maksimal 60 hari setelah pekerjaan fisik selesai. Selanjutnya PPK Sanitasi Kabupaten/Kota menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada KPP untuk difungsikan.

KPP pada tahap Evaluasi pembangunan IPAL SPBM ini berperan cukup penting. Tugas pokok KPP antara lain, Menyusun rencana kerja, mekanisme operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi (IPAL Komunal dengan sistem perpipaan); Mengumpulkan dan mengelola dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari iuran anggota dan pihak-pihak lain; Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi (IPAL Komunal dengan sistem perpipaan); Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pengguna/pemanfaat; dan Melakukan kampanye kesehatan. dalam upaya melestarikan prasarna/sarana terbangun perlu adanya kemampuan diantaranya Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan, misalnya untuk irigasi perdesaan dengan menyusun rencana tata tanam dan rencana pembagian air irigasi.

KPP yang dibentuk untuk mengelola dan memelihara sarana sanitasi IPAL di Desa Pandanrejo telah menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Selama 3 Tahun kedepan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 4.9. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi

Desa : Pandanrejo
 Kecamatan : Bumiaji
 Kota : Batu
 Propinsi : Jawa Timur
 Tahun : 2103

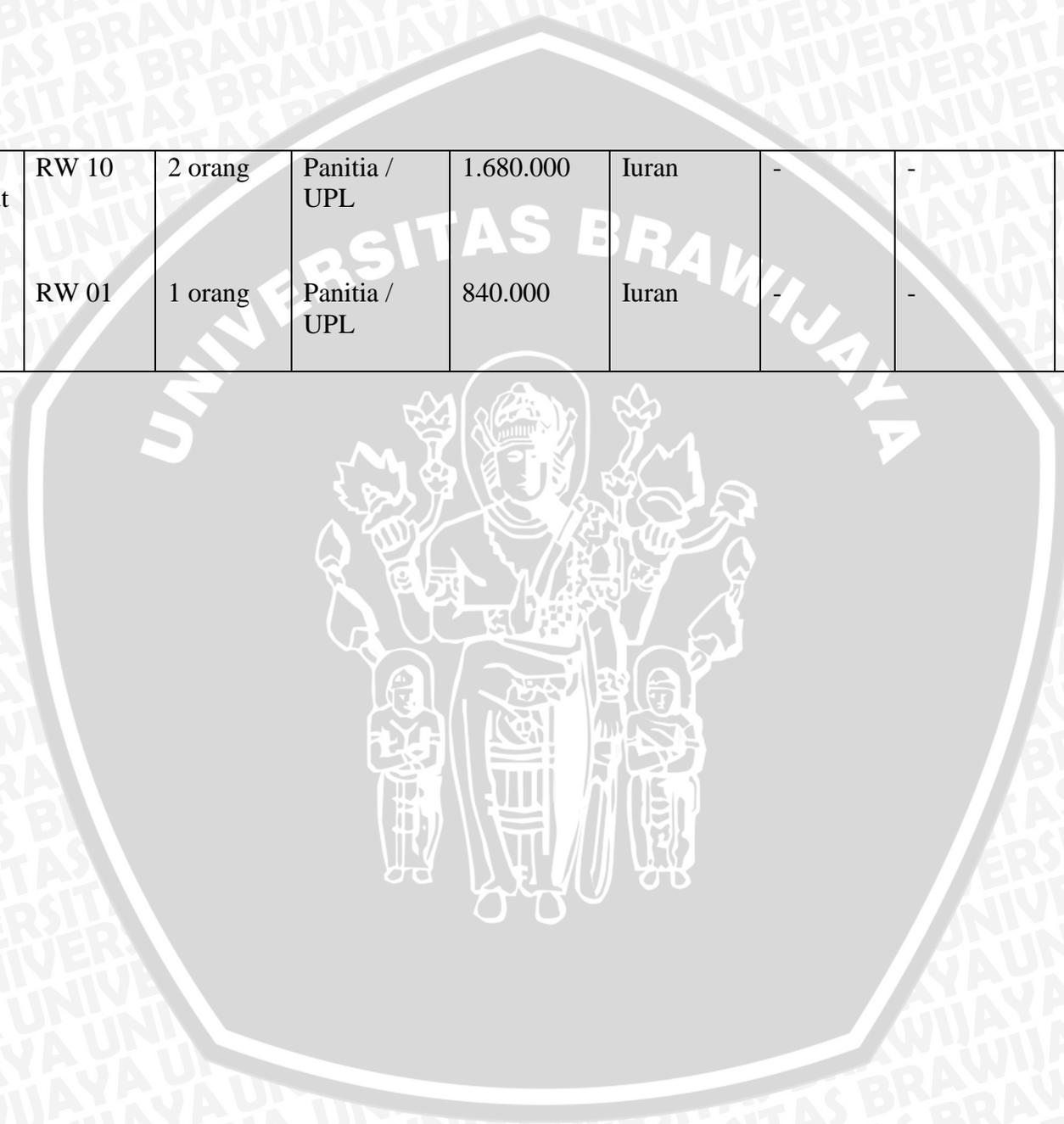
No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Penerima manfaat	Volume	satuan	Harga satuan (Rp)	Jadwal pelaksanaan						Sumber Dana		Penanggung jawab	ket	
							2013		2014		2016		Bantuan/hinbah	masyarakat			
							vol	biaya	vol	biaya	vol	biaya					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	
AIR LIMBAH																	
1	Ipal Komunal / kombinasi MCK IPAL komunal	RW 05	80	1	Unit	350 Juta	IPAL	350 Juta						PNPM	Swadaya	Panitia / UPL	-
		RW 10	76	1	Unit	350 Juta			IPAL	350 Juta				PNPM	Swadaya	Panitia / UPL	-

		RW 03	64	1	Unit	350 Juta					IPAL	350 Juta	PNPM	Swadaya	Panitia / UPL	-
DRAINASE																
2	Pembangunan Gorong – gorong dan / saluran air	RW 05	80	1	Unit	300.000	52m ²	17.992 juta					PNPM	Swadaya	Panitia / UPL	-
		RW 10	76	1	Unit	450.000			50m ²	22.5 Juta			PNPM	Swadaya	Panitia / UPL	-
		RW 03	64	1	Unit	500.000					48m ²	24 Juta	PNPM	Swadaya	Panitia / UPL	-
PERSAMPAHAN																
3	Penambahan tenaga dan kampanye kebersihan	RW 10	80	4	Orang	-	2 orang	140.000	1 orang	85 Ribu	1 orang	95 Ribu	APBD	IURAN	Panitia / UPL	-
		RW 01	70	3	Orang	-	1 orang	70.000	2 orang	170 Ribu	1 orang	95 Ribu	APBD	IURAN	Panitia / UPL	-

Tabel 4.10. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Desa Pandanrejo Tahun 2013

No	Program	Rencana Kegiatan	Lokasi	Volume	Penanggung Jawab	Sumber Dana				Penerima Manfaat (KK)	
						total	Tersedia (Swadaya Yang Ada)	Bisa Diakses APBN	SPBM	L	P
Pembangunan Sarana Sanitasi											
Target 1 : Berkurangnya pembuangan limbah <i>Black Water</i> dan <i>Grey Water</i> ke sungai 45%											
1	IPAL Komunal	Pembangunan MCK Kombinasi / IPAL Komunal	RW 05	1 Unit	Panitia UPL	354.550.000	Ada (4.450.000)	bisa	350.000.000	63	17
Bidang Kegiatan Lingkungan											
Target 1 : Perbaikan fasilitas Lingkungan sebesar 35%											
1	Perbaikan dan Saluran air	Pembangunan gorong – gorong dan drainase	RW 05	1 Unit	Panitia / UPL	17.992.000	Tidak	Bisa	17.992.000	57	32

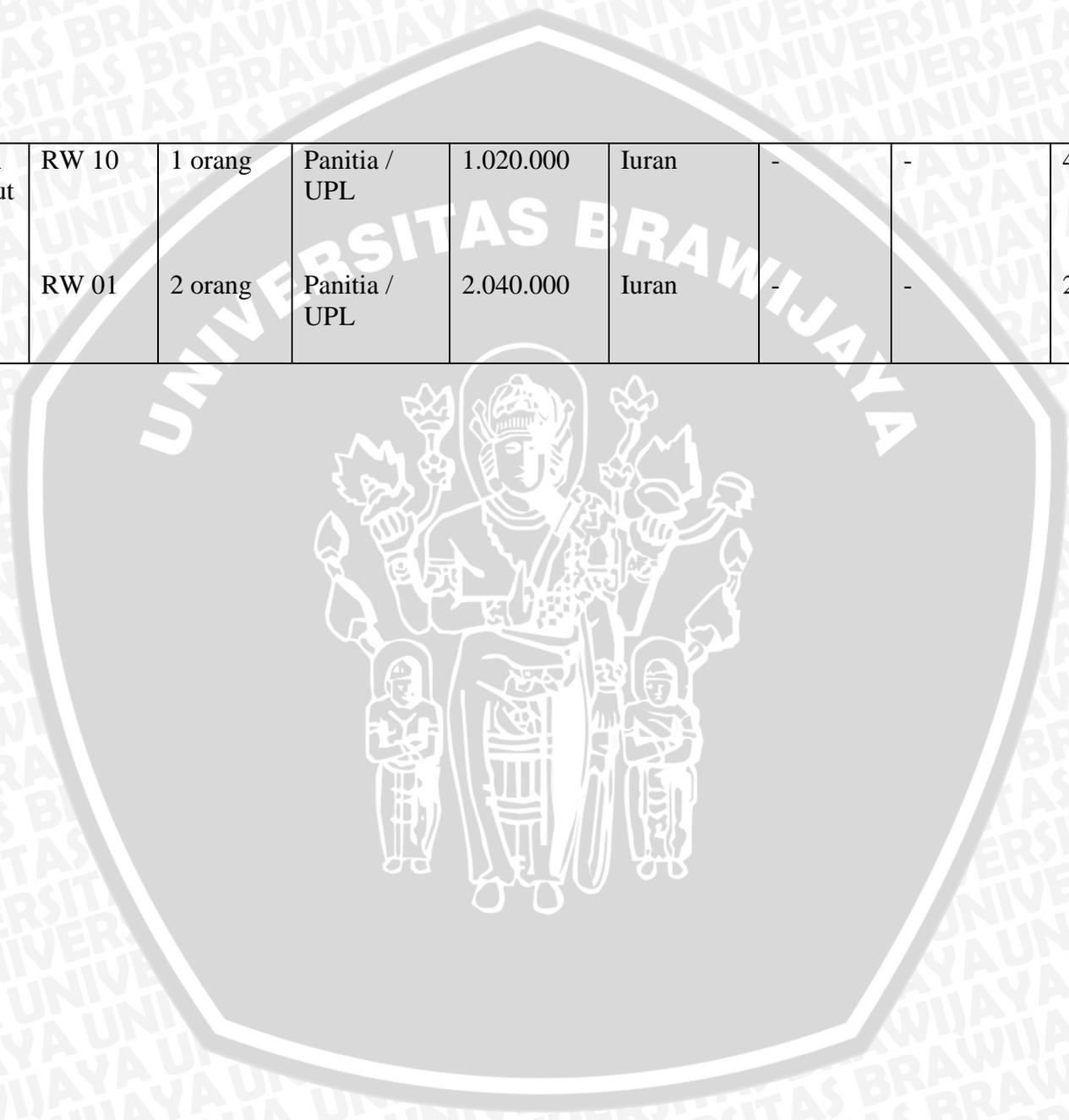
2	Perbaikan bidang persampahan	Penambahan tenaga angkut sampah	RW 10	2 orang	Panitia / UPL	1.680.000	Iuran	-	-	25	55
			RW 01	1 orang	Panitia / UPL	840.000	Iuran	-	-	27	31



Tabel 4.11. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Desa Pandanrejo Tahun 2014

No	Program	Rencana Kegiatan	Lokasi	Volume	Penanggung Jawab	Sumber Dana				Penerima Manfaat (KK)	
						total	Tersedia (Swadaya Yang Ada)	Bisa Diakses APBN	SPBM	L	P
Pembangunan Sarana Sanitasi											
Target 1 : Berkurangnya pembuangan limbah <i>Black Water</i> dan <i>Grey Water</i> ke sungai 45%											
1	IPAL Komunal	Pembangunan MCK Kombinasi / IPAL Komunal	RW 05	1 Unit	Panitia UPL	390.000.000	Ada (4.000.000)	bisa	350.000.000	31	45
Bidang Kegiatan Lingkungan											
Target 1 : Perbaikan fasilitas Lingkungan sebesar 35%											
1	Perbaikan dan Saluran air	Pembangunan gorong – gorong dan drainase	RW 05	1 Unit	Panitia / UPL	22.500.000	Tidak	Bisa	22.500.000	31	45

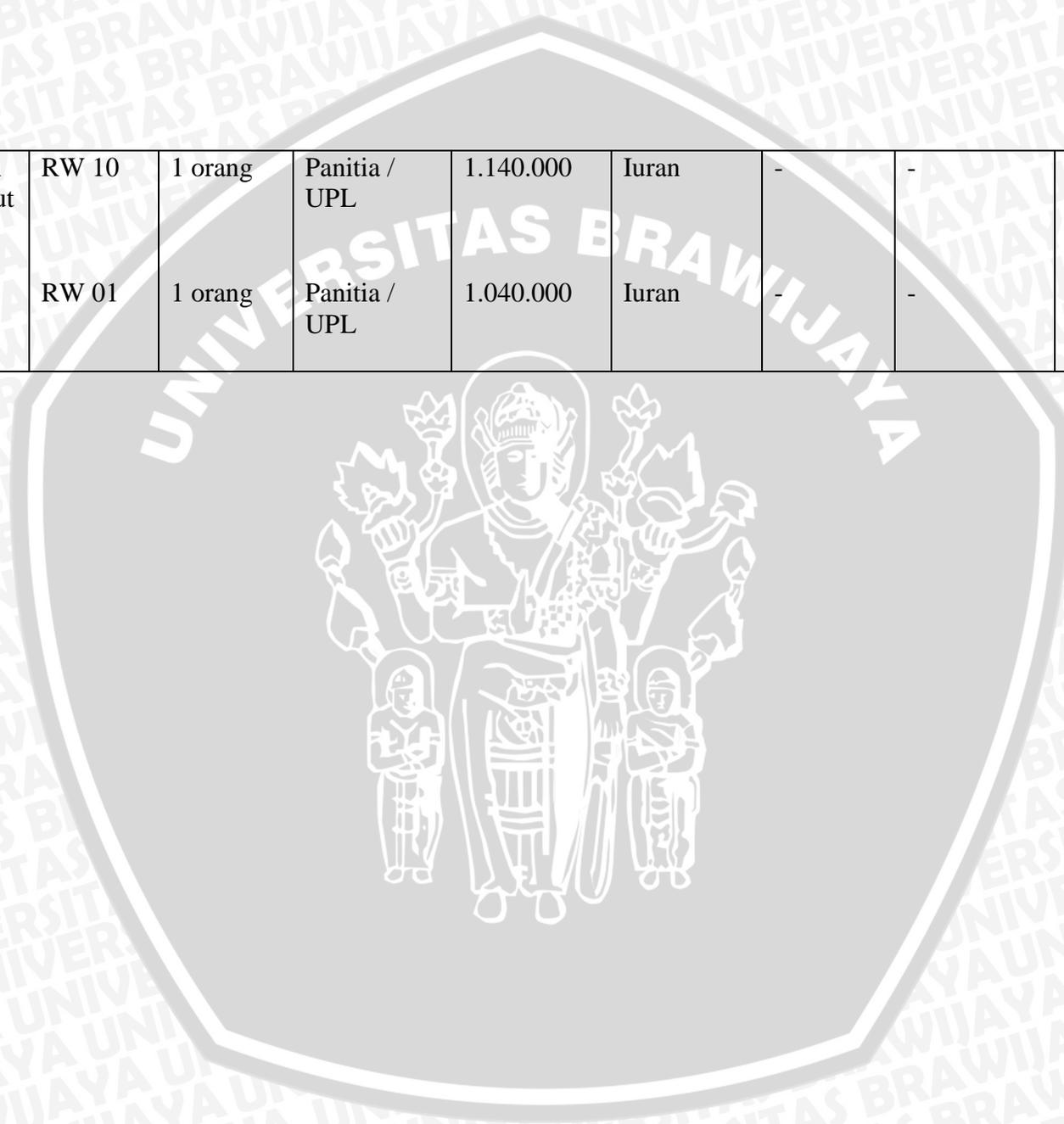
2	Perbaikan bidang persampahan	Penambahan tenaga angkut sampah	RW 10	1 orang	Panitia / UPL	1.020.000	Iuran	-	-	43	27
			RW 01	2 orang	Panitia / UPL	2.040.000	Iuran	-	-	25	39



Tabel 4.12. Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi Desa Pandanrejo Tahun 2015

No	Program	Rencana Kegiatan	Lokasi	Volume	Penanggung Jawab	Sumber Dana				Penerima Manfaat (KK)	
						total	Tersedia (Swadaya Yang Ada)	Bisa Diakses APBN	SPBM	L	P
Pembangunan Sarana Sanitasi											
Target 1 : Berkurangnya pembuangan limbah <i>Black Water</i> dan <i>Grey Water</i> ke sungai 45%											
1	IPAL Komunal	Pembangunan MCK Kombinasi / IPAL Komunal	RW 05	1 Unit	Panitia UPL	353.700.000	Ada (3.700.000)	bisa	350.000.000	29	35
Bidang Kegiatan Lingkungan											
Target 1 : Perbaikan fasilitas Lingkungan sebesar 35%											
1	Perbaikan dan Saluran air	Pembangunan gorong – gorong dan drainase	RW 05	1 Unit	Panitia / UPL	24.000.000	Tidak	Bisa	24.000.000	29	35

2	Perbaikan bidang persampahan	Penambahan tenaga angkut sampah	RW 10	1 orang	Panitia / UPL	1.140.000	Iuran	-	-	34	22
			RW 01	1 orang	Panitia / UPL	1.040.000	Iuran	-	-	23	19



Dari tabel tersebut diatas terdapat tahap evaluasi yang kurang efektif yaitu dalam pencapaian target disetiap tahunnya tidak dilakukan peningkatan yaitu, Berkurangnya pembuangan limbah *Black Water* dan *Grey Water* ke sungai 45% dan Perbaikan fasilitas Lingkungan sebesar 35%. Hal ini tidak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penarikan iuran oleh KPP untuk pemeliharaan IPAL komunal terlalu kecil sehingga berakibat pada perpipaan sering kurang terpelihara. Selain itu kurangnya anggaran pemerintah dalam melakukan pengecekan berkala BOD dan COD yang dilakukan oleh Jasa Tirta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kantor Lingkungan Hidup, sehingga pengecekan BOD dan COD sering diabaikan sehingga masyarakat pengguna IPAL hanya memakai fasilitas IPAL tanpa mengetahui hasil pengolahan air limbah tersebut masih layak atau tidak atau bahkan berbahaya bagi ekosistem sekitar. Dengan adanya masalah di tahap evaluasi pembangunan IPAL SPBM strategi pembangunan IPAL SPBM guna menunjang kawasan Desa Wisata tidak bisa berjalan optimal.

2. Faktor penghambat Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (IPAL SPBM) dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata

Masyarakat Desa Pandanrejo tergolong tipikal masyarakat pedesaan, hal ini tergambar dari struktur masyarakat yang bersifat paguyuban dimana tingkat kepedulian dan kebersamaan yang tinggi terhadap sesama warga dan sumbangsih peran yang sesuai dengan kemampuan masing – masing merupakan bentuk

tanggung jawab warga untuk menjunjung tinggi transparansi maupun legalitas yang proporsional dalam setiap peran kemasyarakatannya.

Potensi dan kontribusi masyarakat terhadap sistem pengambilan keputusan dan pola pembangunan masyarakat secara partisipatif Desa Pandanrejo masih didominasi oleh Kepala Desa, tokoh – tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan rapat – rapat pengambilan keputusan ditingkat Desa Pandanrejo.

Dengan struktur masyarakat Desa yang masih paguyuban dimana tingkat kepedulian dan kebersamaan masih sangat tinggi diharapkan pelaksanaan dapat berjalan lancar, karena mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Namun pada fakta yang terdapat di lapangan muncul beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan IPAL SPBM. Dengan beberapa isu – isu permasalahan dan data serta fakta yang ada di lapangan ada beberapa penghambat dalam pembangunan IPAL pada program SPBM ini sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa Yang Kurang

Sumber Daya Manusia masyarakat Desa yang kurang menjadi salah satu penghambat dari strategi pembangunan IPAL SPBM ini. Karena kebanyakan masyarakat pedesaan mengesampingkan pendidikan. Penolakan pembangunan IPAL yang telah dipetakan oleh Pokjasan dan SSK oleh beberapa masyarakat yang

bertempat tinggal 100m dari lokasi pembangunan. Sehingga pokjasa dan SSK harus memetakan kembali melakukan observasi dan eksplorasi lokasi sehingga memakan waktu duakali lipat.

Keberlanjutan dari Program SPBM bergantung pada peran aktif masyarakat pengguna IPAL dan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara). KPP mengenakan iuran bagi setiap KK pengguna fasilitas IPAL untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan . Namun karena iuran IPAL yang dibebankan pada masyarakat pengguna fasilitas IPAL berakibat pada perpipaan sering kurang terpelihara.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sanitasi

Secara umum kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) telah dilakukan sejak tahun 2002 oleh Dinas Kesehatan melalui sosialisasi di tiap – tiap Desa / Dusun akan tetapi perhatian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih dirasa kurang, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah dan limbah lainnya disembarang tempat. Tanpa adanya pengolahan yang baik lebih dahulu.

Untuk pembuangan sampah masih dijumpai banyaknya tempat pembuangan sampah liar atau dibuang di sungai. Dengan masih juga banyak dijumpai sampah yang menumpuk di depan rumah dengan ditaruh di dalam tas plastik. Padahal hal tersebut sebagai sarang penyakit karena sampah mengandung bau yang tidak sedap dan mengandung banyak lalat yang datang. dengan begitu secara tidak langsung sampah merupakan permasalahan yang harus segera ditangani.

Sedangkan untuk kebiasaan BABS masyarakat di sekitar bantaran sungai masih menggunakan sungai sebagai WC umum tanpa adanya dinding pelindung untuk menutupi aktivitas BABS. Sedangkan untuk pembuangan limbah BABS, langsung dialirkan ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sehingga kader masyarakat secara intensitas melakukan penyadaran PHBS secara terus menerus di sektor sanitasi serta dengan melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam mengefektifkan pola PHBS.

c. Kurangnya Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Mekanisme penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima. Namun bukan berarti tanggung jawab dilimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pemerintah juga memiliki peran yang fundamental demi kelangsungan berjalannya program ini dengan optimal. Pemerintah berperan sebagai kontrol baik dari sisi teknis dan manajemen pengorganisasian. Namun sering terjadi ketidak sinergian antara pemerintah dan masyarakat. Dari segi teknis yang ditemukan dilapangan antara lain, akibat kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga lokasi pembangunan IPAL dialihkan secara mendadak sehingga mengurangi efektifitas waktu pengerjaan. Dari segi manajemen antara lain, kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat untuk PHBS sehingga kontribusi masyarakat yang telah dipetakan pokjasa dan SSK dalam pelaksanaan program SPBM sangat kurang. Pada pengerjaan teknis konstruksi IPAL juga

terdapat masalah karena tim pengawas teknis konstruksi yang ditugaskan kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat sehingga banyak terjadi kesalahan dalam melaksanakan teknis baik dalam pengerjaan ataupun pembelian bahan

d. Kurangnya Sinergi Antar Pemerintah

Untuk kesinambungan prasarana dan sarana sanitasi perlu dibentuk organisasi operasi dan pemeliharaan (O & P). Kegiatan O & P ini bertujuan untuk keberlanjutan pelayanan dan pelestarian asset yang telah dibangun oleh masyarakat. Dalam program SPBM prasarana dan sarana yang dibangun adalah IPAL Komunal dengan sistem perpipaan dan kombinasi MCK dengan perpipaan. Untuk itu perlu dibentuk organisasi kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) yang nantinya akan melakukan operasi dan pemeliharaan. Salah satu Tugas KPP adalah memberikan pelaporan pada DPIU / pemerintah kondisi IPAL yang nantinya ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan pengambilan sampel hasil pengolahan air limbah untuk pengecekan BOD dan COD. Sedangkan pengecekan dilakukan oleh Jasa Tirta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kantor Lingkungan Hidup. Namun karena biaya yang minimal untuk melakukan pengecekan dengan biaya yang mahal pengecekan BOD dan COD sering diabaikan sehingga masyarakat pengguna IPAL hanya memakai fasilitas IPAL tanpa mengetahui hasil pengolahan air limbah tersebut masih layak atau tidak atau bahkan berbahaya bagi ekosistem sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian berupa observasi dan wawancara di lapangan serta berlandaskan fokus penelitian, penulis menemukan kesimpulan antara lain:

1. Strategi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam menunjang kawasan Desa Wisata agar berjalan optimal yaitu:
 - a. Memberdayakan masyarakat dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Pendampingan masyarakat untuk melaksanakan pemetaan kemiskinan (sanitasi, identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, mengevaluasi kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif) dalam bentuk pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menunjang kawasan Desa Wisata di Desa Pandanrejo agar berjalan optimal.
 - b. Mengacu pada teori, untuk mengoptimalkan pembangunan IPAL SPBM dalam menunjang kawasan Desa Wisata terdapat 3 tahapan

pelaksanaan Strategi pembangunan IPAL SPBM dalam menunjang kawasan Desa Wisata di Desa Pandanrejo, yaitu:

- Perencanaan Pembangunan IPAL SPBM
- Implementasi Pembangunan IPAL SPBM
- Evaluasi Pembangunan IPAL SPBM

2. Faktor penghambat Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menyebabkan Strategi tidak dapat berjalan optimal. Dari hasil observasi dan wawancara dilapangan penulis menemukan beberapa penghambat antara lain:

- a. Dalam setiap tahapan pelaksanaan strategi pembangunan IPAL SPBM dalam menunjang kawasan Desa Wisata terdapat peran lembaga yang berbeda – beda.
- b. Dalam tahap proses pembangunan IPAL SPBM peran lembaga yang ada bersifat multistruktural dan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas - tugas pada masing masing lembaga sehingga strategi guna menunjang kawasan wisata tidak bisa berjalan optimal.
- c. SDM masyarakat pedesaan yang kurang sehingga dalam tahapan perencanaan dan implementasi tidak berjalan baik dan strategi pembangunan IPAL SPBM dalam menunjang kawasan Desa Wisata tidak bisa berjalan optimal.
- d. Kurang adanya kerjasama antar lembaga pemerintah yang bersangkutan dalam tahapan evaluasi mengenai anggaran operasional

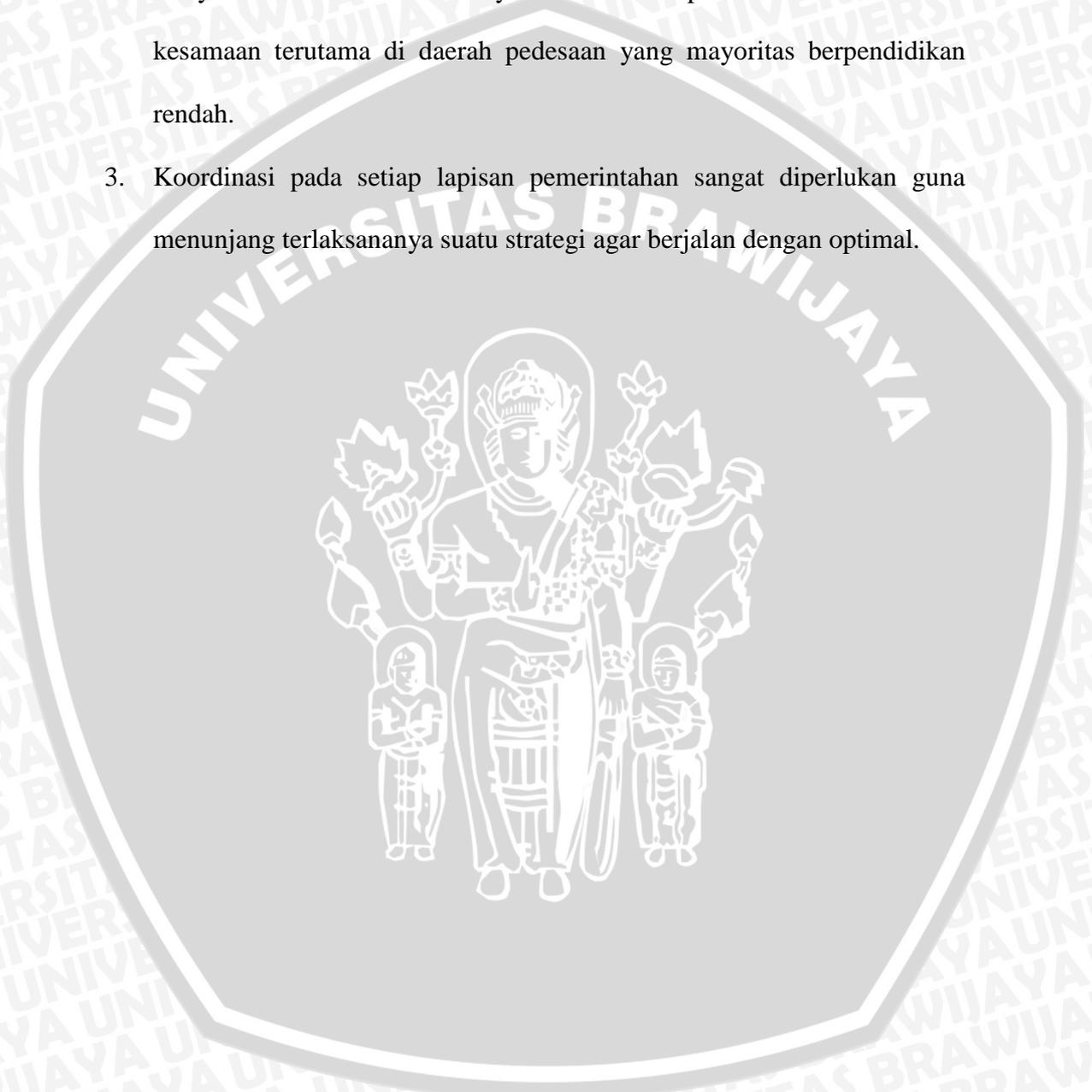
B. SARAN

Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena berlangsung secara terus - menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu berubah - ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Strategi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Dalam Menunjang Kawasan Desa Wisata di Desa Pandanrejo telah menguatkan pendapat Fred R. David, tentang tiga tahapan manajemen strategik agar sebuah strategi berjalan optimal yaitu, Formulasi/Perencanaan; Implementasi/Pelaksanaan; dan Evaluasi. Namun terdapat beberapa permasalahan di tiap - tiap tahapan tersebut, sehingga penulis berkesimpulan manajemen strategik tidak dapat berjalan optimal. Dari permasalahan tersebut, penulis mengacu pada teori yang relevan berharap memberikan kontribusi berupa saran antara lain:

1. Rasionalitas birokrasi diperlukan dalam membentuk lembaga - lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan setiap tahapan suatu strategi agar manajemen strategik dapat berjalan dengan optimal.

2. Perlu adanya sosialisasi secara bertahap dan mendalam untuk tahapan perencanaan suatu strategi dalam melaksanakan program yang berbasis masyarakat karena sumber daya manusia setiap daerah tidak memiliki kesamaan terutama di daerah pedesaan yang mayoritas berpendidikan rendah.
3. Koordinasi pada setiap lapisan pemerintahan sangat diperlukan guna menunjang terlaksananya suatu strategi agar berjalan dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfred, D. Chandler, Jr. 1962. *Strategy and Structure. Chapters in the history of the industrial enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press
- Arsyad, Ashar. 2003. *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali pers
- Bryant, Coralie dan Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Cameron, Kim S., Robert E. Quinn. 1999. *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. Reading, Massachusetts: Addison Wesley
- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Grigg, Neil. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and Sons.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darre. 2000. *Infrastructure System Management & Optimization*. Internasional Seminar “Paradigm & Strategy of Infrastructure Management” Civil Engeeneering Departement Dipononegoro University.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Inskeep, Edward.1991. *Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen. Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maskun, Sumitro. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challanges, Makalah Bagian dari Laporan Konfrensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.

Parwoto. 1997. *Pembangunan Partisipatif, Makalah pada Lokakarya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Permukiman*. Jakarta: BKPAN.

Purwanto, Iwan. 2007. *Manajemen Strategi*. Bandung: CV Yrama Widya

Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpina*. Jakarta: Penerbit Rhineka.

Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM Press

WTO. 1980. *Social and cultural Impact of Tourist Movements*. Madrid: World Tourism Organization: WTO

Web

http://2frameit.blogspot.co.id/2012_07_01_archive.html (diakses pada tanggal 4 Desember 2015 : 20.30)

http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=123 (diakses pada tanggal 4 Desember 2015 : 21.00)

<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=100&id=1037> (diakses pada tanggal 14 November 2015 : 13.00)

Peraturan Perundang - Undangan

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa

Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Gambar 5.1. Rembug BKM “BHAKTI SEJAHTERA” Desa Pandanrejo



Gambar 5.2. Rembug KSM Desa Pandanrejo



Gambar 5.3. Pengerjaan Pipa IPAL SPBM Desa Pandanrejo



Gambar 5.4. Pengecekan berkala oleh pemanfaat



Gambar 5.5. Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah Desa Pandanrejo



Gambar 5.6. Pemanfaatan hasil olahan IPAL terhadap tanaman di Desa Pandanrejo